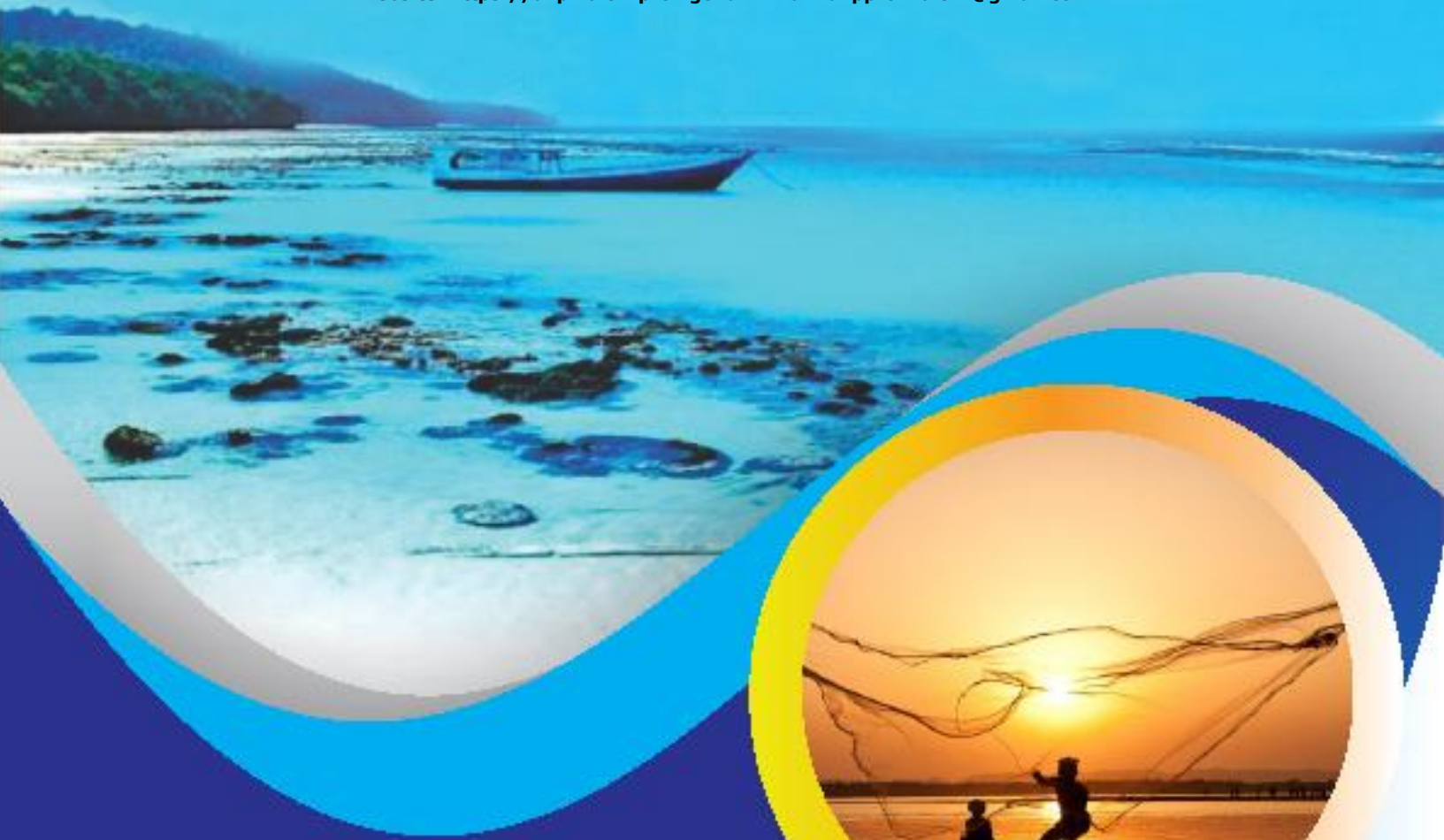




DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Kesuma Bangsa No. 1 Telp. (0541) 743506 - 741977 - 741699, Fax. 743677
Website: <https://dkp.kaltimprov.go.id> - Email: dkpprovkaltim@gmail.com



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2024-2026



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 yang ditangani oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan perencanaan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Perikanan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Provinsi berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan RPJMD pada tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, tema pembangunan, prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, penutup, dan lampiran. Renstra 2024-2026 ini merupakan proses pembangunan 3 (tiga) tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan lanjutan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
2. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan terdahulu.
3. *Cascading* Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur lebih terarah.

Samarinda, Juli 2023

Kepala Dinas,



H. Irhan Hukmaidly, S.Pi, MP

NIP. 197512282000031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II Gambar Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan	26
2.2.1. SDM Dinas Kelautan dan Perikanan	26
2.2.2. Sarana dan Prasarana	27
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	31
2.3.1. Potensi Kelautan dan Perikanan	31
2.3.2. Kelautan, Pesisir dan Pengawasan	32
2.3.3. Capaian Indikator Kinerja	35
2.3.4. Produksi Kelautan dan Perikanan	37
2.3.5. Konsumsi Ikan	38
2.3.6. Ekspor Hasil Perikanan	38
2.3.7. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan	39
2.3.8. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	40
2.3.9. Realisasi Anggaran	41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	43
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	44
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44
3.2. Tema dan Prioritas Pembangunan	55
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	56
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	58
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	61
BAB IV Tujuan dan Sasaran	65
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	90
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	98
BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	136
BAB VIII Penutup	140

DAFTAR TABEL

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambar Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.1. Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	26
Tabel 2.2. Aset Dinas Kelautan dan Perikanan	27
Tabel 2.3. Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur ...	31
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP Prov Kaltim 2019-2023	36
Tabel 2.5. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	37
Tabel 2.6. Angka Konsumsi Makan Ikan	38
Tabel 2.7. Angka Ekspor Hasil Perikanan	38
Tabel 2.8. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan	39
Tabel 2.9. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	40
Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	42

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026	52
---	----

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP Prov Kaltim	71
Tabel 4.2. Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan	73
Tabel 4.3. Cascading Dinas Kelautan dan Perikanan	74

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan DKP Prov Kaltim	93
---	----

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	99
---	----

BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	137
---	-----

BAB VIII Penutup

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	14
Gambar 2.	14
Gambar 3.	14
Gambar 4.	15
Gambar 5.	70
Gambar 6.	70
Gambar 7.	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sector ekonomi yang memegang peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sector kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan juga agenda nawa cita, dimana aspek kemaritiman menjadi pondas pembangunan Indonesia. Hal ini sesuai sejalan dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dimana pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan berkelanjutan.

Sejarah kejayaan bahari di Indonesia pernah terukir melalui kejayaan kerajaan-kerajaan yang ada. Laut sebagai penggerak perekonomian sehingga menjadikan nusantara berada pada posisi terhormat dalam percaturan perdagangan, ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan bahkan sampai saat ini kearifan-kearifan tradisional dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan tetap bertahan.

Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya semua pihak merasa optimis bahwa sektor Kelautan dan Perikanan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Timur, mengingat sumberdaya kelautan dan perikananannya sangat berpotensi. Meski demikian kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga ketertinggalan serta kemiskinan sebagian nelayan dan pembudidaya ikan masih cukup tinggi.

Guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta mengurangi pengangguran, maka dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah daerah senantiasa secara konsisten menyelaraskan berbagi program dan kegiatannya terutama terkait dengan alokasi belanja yang mendukung kegiatan perekonomian yang mampu memacu pertumbuhan dan memperluas lapangan pekerjaan serta mengurangi kemiskinan.

Pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, merupakan pendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dasar perencanaan pembangunan nasional agar terjadi sinkronisasi, integrasi dan keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sinkronisasi, integrasi dan keselarasan tersebut diwujudkan melalui perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, matang, relevan dan konsisten pada masing-masing jenjang agar hasil akhir pembangunan dapat terwujud secara efektif dan efisien sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Dalam perekonomian nasional, penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor dan penerimaan pajak. Dalam perkembangannya, subsektor ini tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global. Perubahan strategis nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan.

Amanat pembangunan nasional dalam 9 (sembilan) agenda Prioritas NAWACITA yang wajib dilaksanakan untuk pengembangan subsektor kelautan dan perikanan, mencakup 2 (dua) Agenda Prioritas, yaitu : (1) **Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional** dengan sub agenda prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan industrialisasi berbasis komoditas kelautan dan perikanan, dengan sasaran pokok sub agenda prioritas ini adalah peningkatan produksi komoditas andalan dan prospektif ekspor perikanan seperti udang windu, kepiting, ikan segar dan ikan olahan serta mendorong industrialisasi di pedesaan; dan (2) **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik** dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran pokok sub agenda prioritas ini adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan dari ikan yang bersumber dari produksi dalam negeri untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan industri rumah tangga. Adapun peningkatan pangan ini didukung oleh Program Nasional GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan).

Laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan

yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah **bagaimana upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan**. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam daerah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program subsektor kelautan dan perikanan agar mampu eksis dan unggul dalam menghadapi perubahan ekonomi global, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya melaksanakan perubahan secara berkelanjutan menuju arah perbaikan positif dengan berbagai program kegiatan yang bersolusi, aplikatif, inovatif dan ramah lingkungan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang kian kompleks, diantaranya melalui penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 ini. Tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja setiap elemen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih terarah, efektif dan efisien dalam mewujudkan transformasi ekonomi dan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak terbarui menjadi sumber daya alam terbarui termasuk pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan berbagai peningkatan

produktivitas serta penurunan emisi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 65, tambahan Lembaga-Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).
 25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041;
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Izin Trayek dan Tarif Izin Usaha Perikanan;
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor xx Tahun 202x tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis tahun 2024-2026 adalah sebagai dasar bagi setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan program dan kegiatan subsektor kelautan dan perikanan periode 2024-2026 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan) provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2024-2026 adalah :

Mengetahui capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang mengiringi, sasaran strategis pembangunan, serta bagaimana upaya pencapaian tujuan pembangunan subsektor kelautan dan perikanan dalam lima tahun mendatang.

1. Sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan subsektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan periode 2024-2026.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya, dan
3. Sebagai acuan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 serta Sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Bab ini menyajikan hasil identifikasi permasalahan pelayanan dan Isu-Isu Strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Serta memuat Cascading Kinerja (Tujuan, Sasaran, Outcome, Output, serta Indikator masing-masing.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Di bab ini paling sedikit memuat tentang strategi, arah kebijakan RPD dan *major project* guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis. Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator, target dan pagunya.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Bab VIII. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan memerlukan dukungan penuh dari semua organisasi perangkat daerahnya, termasuk pula dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur perangkat daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dengan demikian memiliki tugas untuk membantu gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan dan tugas pemantauan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, khususnya di subsektor perikanan yang merupakan bagian dari sektor pangan. Sebagai pengelola subsektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur bertanggungjawab atas segala capaian kinerja pembangunan subsektor kelautan dan perikanan periode sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan subsektor kelautan dan perikanan saat ini dan perencanaan pengembangan subsektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta upaya pencapaian Tema Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerja sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* secara kontinyu dan konsisten disetiap tahan program kegiatannya. Upaya tersebut membuahkan hasil sebagaimana terlihat dari hasil evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 yang menunjukkan perkembangan cukup baik, meski masih terdapat beberapa poin penting yang harus dipercepat progres pencapaiannya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari elemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur harus memprioritaskan program dan kegiatannya

pada peningkatan kualitas, kuantitas, mutu, konsistensi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.

Adapun gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 dapat dilihat dari hasil analisis indikator capaian kinerja pelayanan, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, segala sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dan identifikasi terhadap tantangan dan peluang (struktur dan gestur tanah, cuaca, iklim, masyarakat, hingga fenomena sosial ekonomi yang terus berubah) untuk dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki peran vital dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki fungsi dan tujuan teknis dalam pembangunan subsektor kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam perjalanan kerjanya hingga saat ini memiliki sejarah perkembangan organisasi yang cukup panjang. Adapun dasar pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan pengembangan komoditi dan usaha kelautan dan perikanan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan pengolahan promosi dan pemasaran kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahkan:
 - a. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Kasi Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).
 - b. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Kasi Reklamasi dan Jasa Kelautan).
 - c. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Kasi Konservasi Kelautan dan Perikanan).
4. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Kasi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan).
 - b. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Kasi Pengendalian Penangkapan Ikan).

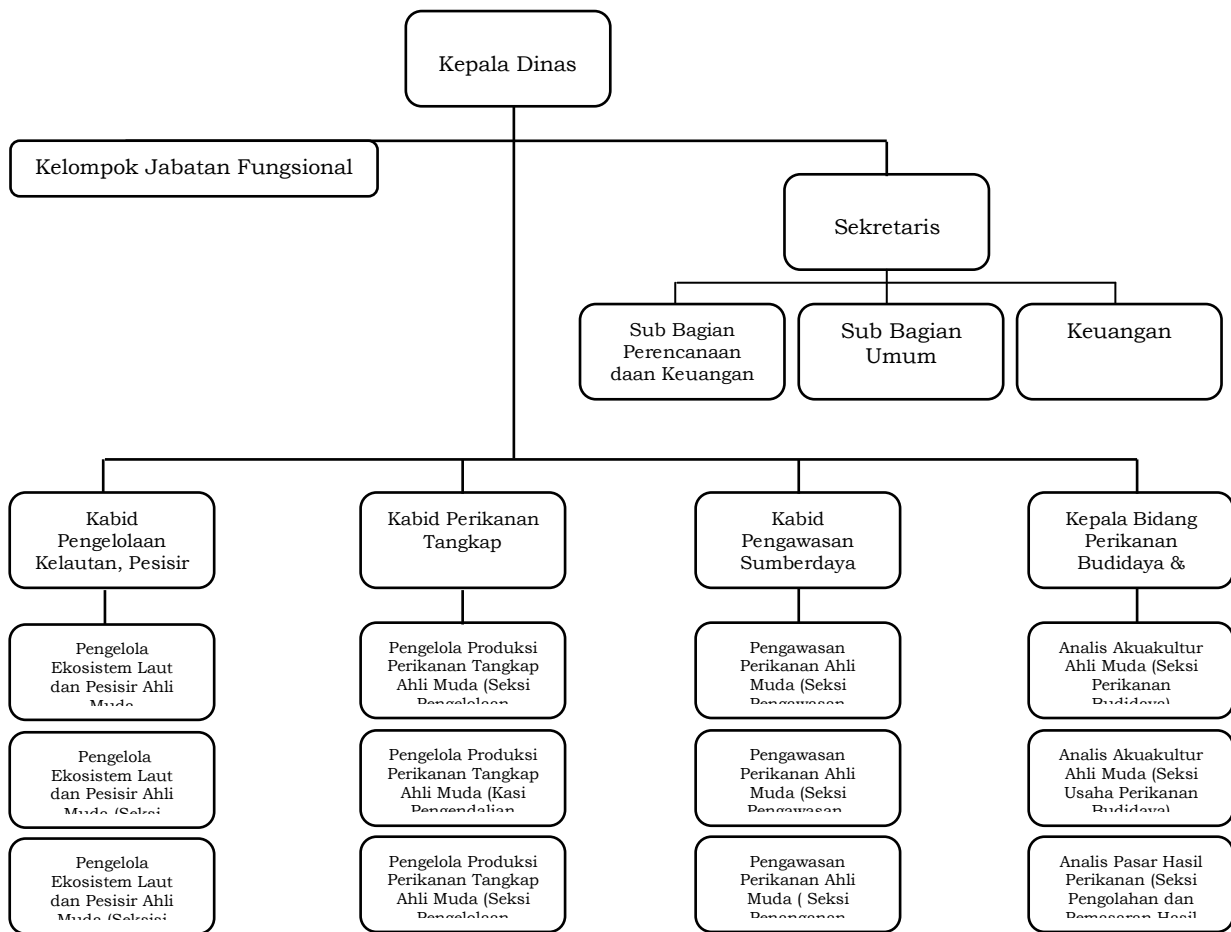
- a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Kasi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan).
5. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 - a. Pengawas Perikanan Ahli Muda (Kasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan).
 - b. Pengawas Perikanan Ahli Muda (Kasi Pengawasan, Pembudidaya, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan).
 - c. Pengawas Perikanan Ahli Muda (Kasi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan).
6. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan:
 - a. Analis Akuakultur Ahli Muda (Kasi Perikanan Budidaya).
 - b. Analis Akuakultur Ahli Muda (Kasi Usaha Perikanan Budidaya).
 - c. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda (Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan).
7. Jabatan Fungsional

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari:

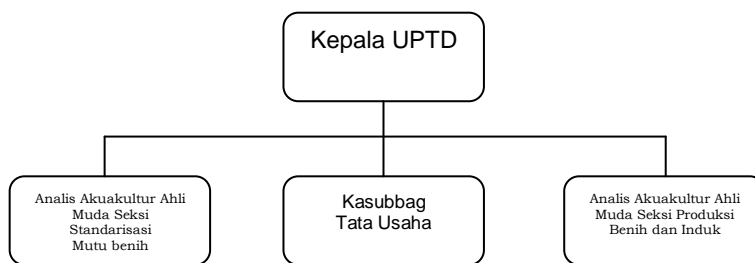
- a. UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Laut Manggar (BBSPAPAL).
- b. UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Laut Sebulu (BBSPAPAL).
- c. UPTD Penerapan Mutu dan Hasil Perikanan (PMHP).

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2016 dan Nomor 100 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

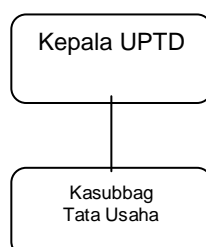
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur



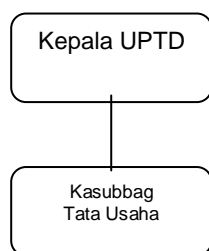
Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SPAPAL) Manggar



Gambar 3. Struktur Organisasi UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SPAPAL) Sebulu



Gambar 4. Struktur Organisasi UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) Samarinda



a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) ukuran 5-10 GT dan ukuran kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut

ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) ukuran 5-10 GT dan ukuran kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) ukuran 5-10 GT dan ukuran kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

b. Sekretaris

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- d. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum;

1. Tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, RKA, DPA, DIPA, LAKIP, dan menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan UPTD dan lain sebagainya.
- b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan, meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran.

2. Tugas Sub Bagian Umum:

Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi.

c. Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan pencadangan kawasan konservasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
- c. Pelaksanaan penyiapan penataan batas kawasan konservasi;
- d. Pelaksanaan penyiapan pengelolaan kawasan konservasi;

- e. Pelaksanaan penyiapan penetapan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K);
- f. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis lokasi reklamasi;
- g. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis pelaksanaan reklamasi;
- h. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis lokasi perairan pesisir;
- i. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis biofarmakologi laut;
- j. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis bioteknologi laut;
- k. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis wisata bahari;
- l. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis pemanfaatan air laut selain energi;
- m. Pelaksanaan penyiapan penerbitan pertimbangan teknis lokasi dan pertimbangan teknis pengelolaan benda muatan kapal tenggalam (BMKT);
- n. Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Membawahkan:

- a. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Seksi Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).
- b. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Seksi Reklamasi dan Jasa Kelautan).
- c. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan).

1. Tugas Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Seksi Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi dan pemberdayaan

masyarakat pulau-pulau kecil.

2. Tugas Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Seksi Reklamasi dan Jasa Kelautan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan pertimbangan teknis lokasi reklamasi, pelaksanaan reklamasi, lokasi perairan pesisir, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi.

3. Tugas Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda (Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi.

d. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) ukuran 5-10 GT dan ukuran kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- c. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;
- d. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;

- e. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- f. pelaksanaan penyiapan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Membawahkan:

- a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan).
 - b. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan).
 - c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan).
1. Tugas Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan):
Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
 2. Tugas Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan):
Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, penerbitan buku kapal, penerbitan tanda daftar kapal perikanan (TDKP) ukuran sampai dengan 7 (tujuh) GT, perjanjian kerja laut (PKL) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT dan penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan (P2KP) kapal ukuran 7 sampai 30 GT.
 3. Tugas Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan):
Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

e. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan

Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Budidaya Dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
- b. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- c. pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan Membawahkan:

- a. Analisis Akuakultur Ahli Muda (Seksi Perikanan Budidaya).
 - b. Analisis Akuakultur Ahli Muda (Seksi Usaha Perikanan Budidaya).
 - c. Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda (Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan).
1. Tugas Analisis Akuakultur Ahli Muda (Seksi Perikanan Budidaya):
Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan.
 2. Tugas Analisis Akuakultur Ahli Muda (Seksi Usaha Perikanan Budidaya):
Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
 3. Tugas Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda (Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan):
Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), penguatan daya saing produk perikanan.

f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);
- b. Pelaksanaan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;
- c. Pelaksanaan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan penyiapan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan penyiapan penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan penyiapan penerbitan surat laik operasi untuk kapal perikanan 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Membawahkan:

- a. Pengawas Perikanan Ahli Muda (Seksi Pengawasan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan).
- b. Pengawas Perikanan Ahli Muda (Seksi Pengawasan Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan).
- c. Pengawas Perikanan Ahli Muda (Seksi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan).

1. Tugas Pengawas Perikanan Ahli Muda (Seksi Pengawasan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangkapan ikan.

2. Tugas Pengawas Perikanan Ahli Muda (Seksi Pengawasan Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

3. Tugas Pengawas Perikanan Ahli Muda (Seksi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan):

Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan.

g. Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Kelas B

Melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/evaluasi, pembinaan, pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Penerapan Mutu dan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pengambilan contoh, pemeriksaan dan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir dari unit pengolahan hasil perikanan dalam rangka pemberian jaminan mutu dan jaminan keamanan pangan;
- b. Membimbing, membina dan mengadakan pengawasan serta menguji ketelitian dan kecermatan bekerja dari laboratorium Unit Pengolahan Ikan di wilayah kerjanya ;
- c. Memberikan bimbingan teknis dalam segala bidang dan aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan;
- d. Melaksanakan monitoring terhadap mutu hasil perikanan yang didistribusikan/dipasarkan ;
- e. Sepengetahuan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan pengkajian teknis-teknis pengolahan dan menyampaikan kepada unit-unit pengolahan ;
- f. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit atau satuan kerja pembinaan, pengawasan dan pengujian mutu hasil perikanan di Kabupaten/Kota dan milik Pemerintah maupun Swasta ;
- g. Melaksanakan urusan ketatausahaan.

UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Kelas B, Membawahkan:

a. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penerapan Mutu dan Hasil Perikanan.

1. Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penerapan Mutu dan Hasil Perikanan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan bahan kebijakan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

h. **Kepala UPTD Sentral Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu, Kelas B**

Melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/evaluasi, pembinaan, standarisasi mutu benih, produksi benih dan induk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Sentral Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pengendalian mutu benih dan produksi benih.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengendalian mutu benih dan produksi benih
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian mutu benih dan produksi benih
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Sentral Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu, Kelas B, Membawahkan:

- a. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sentral Air Tawar (SAT) Sebulu.

1. Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sentral Air Tawar (SAT) Sebulu:

Melakukan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, administrasi umum dan keuangan.

i. **Kepala UPTD Sentral Air Payau dan Air Laut (SAPAL) Manggar.**

Melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/evaluasi, pembinaan, standarisasi mutu benih, produksi benih dan induk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pengendalian mutu benih dan produksi benih.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengendalian mutu benih dan produksi benih
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian mutu benih dan produksi benih
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar Membawahkan:

- a. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar.
- b. Seksi Standarisasi Mutu Benih UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar.
- c. Seksi Produksi Benih dan Induk UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar.
 1. Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar:
Melakukan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, administrasi umum dan keuangan.
 2. Tugas Seksi Standarisasi Mutu Benih UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar:
Standardisasi mutu benih dan calon induk.
 3. Tugas Seksi Produksi Benih dan Induk UPTD Sentral Air Payau dan Laut (SAPAL) Manggar:
Melaksanakan dan menerapkan teknologi pembenihan dan produksi calon induk ikan air payau dan air laut.

j. **Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok, dengan tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor kelautan dan perikanan dapat dianalisis dari sumber daya aparatur (SDM) dan asset/modal yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi teknis, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang berkuantitas dan berkualitas sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan data kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022, jumlah keseluruhan SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 224 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat*) orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 140 (*Seratus Empat Puluh*) orang dan Pegawai Honorer/PPT sebanyak 84 (*Delapan Puluh Empat*) orang, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel. 2.1 Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim

Komposisi Pegawai	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
	L	P	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
ASN	78	51	45	55	36	13	1	28	34	8	44	9	5
Pegawai Honorer/PPT	100	33	-	-	-	-	-	2	34	2	31	-	64
Jumlah ASN + Honorer	178	84	45	55	36	13	1	30	68	10	75	9	69

Sumber: LKjIP 2022

Data kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur di atas, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur cukup memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, baik secara administrasi maupun teknis.

2.2.2.Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran maupun lapangan merupakan suatu kebutuhan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Kelengkapan dan kualitas sarana prasarana akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan dan sarana pembangunan subsektor kelautan dan perikanan, baik dari sisi administrasi maupun lapangan yang erat kaitannya langsung dengan nelayan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, baik itu yang berasal dari anggaran APBD maupun APBN, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.2 Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Kode Barang	Jenis>Nama Barang	Banyaknya	Satuan
01.01.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung		
01.01.11.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	42.253	M2
02.02.01	Alat-Alat Besar Darat		
02.02.01.011	Mesin Proses	4	Unit
02.02.02	Alat-Alat Besar Apung		
02.02.02.05	Mesin Proses Apung	4	Unit
02.02.03	Alat-Alat Bantu		
02.02.03.03	Compressor	5	Unit
02.02.03.04	Electric Generating Set	4	Unit
02.02.03.05	Pompa	153	Unit
02.02.03.06	Mesin Bor	1	Unit
02.02.03.07	Unit Pemeliharaan Lapangan	1	Unit
02.03.01	Alat Angkutan Darat Bermotor		
02.03.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18	Unit
02.03.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	3	Unit
02.03.01.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3	Unit
02.03.01.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	127	Unit
02.03.01.06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1	Unit
02.03.02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor		
02.03.02.01	Angkutan Barang	2	Unit
02.03.03	Alat Angkut Apung Bermotor		
02.03.03.01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	1	Unit
02.03.03.02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	14	Unit
02.03.04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
02.03.04.02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	5	Unit
02.04.01	Alat Bengkel Bermesin		
02.04.01.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	3	Unit
02.04.01.02	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang yang Berpindah	1	Unit
02.04.01.03	Perkakas Bengkel Listrik	2	Unit
02.04.01.04	Perkakas Bengkel Service	4	Unit
02.04.01.09	Perkakas Pabrik Es	44	Unit
02.04.02	Alat Bengkel Tak Bermesin		
02.04.02.08	Peralatan Tukang-Tukang Besi	6	Unit

Kode Barang	Jenis>Nama Barang	Banyaknya	Satuan
02.04.02.012	Peralatan Bengkel Keramik	15	Unit
02.04.03	Alat Ukur		
02.04.03.01	Alat Ukur Universal	12	Unit
02.04.03.08	Alat Ukur/Pembanding	16	Unit
02.04.03.09	Alat Ukur Lainnya	2	Unit
02.04.03.010	Alat Timbangan/Blora	8	Unit
02.05.01	Alat Pengolahan		
02.05.01.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1	Unit
02.05.01.04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	9	Unit
02.05.01.06	Alat Prosesing	2	Unit
02.05.01.07	Alat Pasca Panen	1	Unit
02.05.01.08	Alat Produksi Perikanan	100	Unit
02.05.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		
02.05.02.03	Alat Penyimpanan	51	Unit
02.05.02.05	Alat Penangkap Ikan	18	Unit
02.06.01	Alat Kantor		
02.06.01.01	Mesin Ketik	42	Unit
02.06.01.02	Mesin Hitung/Jumlah	1	Unit
02.06.01.03	Alat Reproduksi (Pengganda)	7	Unit
02.06.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	140	Unit
02.06.01.05	Alat Kantor Lainnya	46	Unit
02.06.02	Alat Rumah Tangga		
02.06.02.01	Meubelair	1154	Buah
02.06.02.02	Alat Pengukur Waktu	4	Buah
02.06.02.03	Alat Pembersih	40	Buah
02.06.02.04	Alat Pendingin	207	Unit
02.06.02.05	Alat Dapur	86	Buah
02.06.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	299	Buah
02.06.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	1	Buah
02.06.03	Peralatan Komputer		
02.06.03.01	Server Komputer	12	Unit
02.06.03.02	Personal Komputer	213	Unit
02.06.03.03	Peralatan Komputer Mainframe	6	Unit
02.06.03.04	Peralatan Mini Komputer	61	Unit
02.06.03.05	Peralatan Personal Komputer	24	Unit
02.06.03.06	Peralatan Jaringan	18	Buah
02.06.04	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
02.06.04.01	Meja Kerja Pejabat	166	Buah
02.06.04.02	Meja Rapat Pejabat	8	Buah
02.06.04.03	Kursi Kerja Pejabat	194	Buah
02.06.04.07	Lemari dan Arsip Pejabat	46	Buah
02.07.01	Alat Studio		
02.07.01.01	Peralatan Studio Visual	66	Buah
02.07.01.02	Peralatan Studio Video dan Film	66	Buah
02.07.01.04	Peralatan Cetak	1	Buah
02.07.02	Alat Komunikasi		
02.07.02.01	Alat Komunikasi Telephone	38	Buah
02.07.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB	16	Buah
02.07.02.04	Alat Komunikasi Radio VHF	1	Buah
02.07.02.05	Alat Komunikasi Radio UHF	20	Buah
02.07.03	Peralatan Pemancar		
02.07.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW	2	Unit
02.07.03.06	Peralatan Antena SHF/Parabola	1	Unit

Kode Barang	Jenis>Nama Barang	Banyaknya	Satuan
02.07.03.015	Peralatan Microvawe	1	Unit
02.08.01	Alat Kedokteran		
02.08.01.01	Alat Kedokteran Umum	12	Unit
02.08.01.02	Alat Kedokteran Gigi	7	Unit
02.08.01.07	Alat Farmasi	10	Unit
02.08.01.08	Alat Kedokteran Bedah	7	Unit
02.09.01	Unit-Unit Laboratorium		
02.09.01.01	Alat Laboratorium Kimia Air	62	Unit
02.09.01.02	Alat Laboratorium Microbiologi	66	Unit
02.09.01.03	Alat Laboratorium Hidro Kimia	6	Unit
02.09.01.06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan	4	Unit
	Konstruksi		
02.09.01.07	Alat Laboratorium Aspal Cat dan kimia	2	Unit
02.09.01.08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	2	Unit
02.09.01.010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, listrik	13	Unit
02.09.01.012	Alat Laboratorium Umum	45	Unit
02.09.01.013	Alat Laboratorium Umum A	6	Unit
02.09.01.014	Alat Laboratorium Kedokteran	5	Unit
02.09.01.015	Alat Laboratorium Microbiologi	16	Unit
02.09.01.016	Alat Laboratorium Kimia	17	Unit
02.09.01.017	Alat Laboratorium Microbiologi A	1	Unit
02.09.01.018	Alat Laboratorium Patologi	33	Unit
02.09.01.019	Alat Laboratorium Immunologi	1	Unit
02.09.01.020	Alat Laboratorium Hematologi	104	Unit
02.09.01.021	Alat Laboratorium Film	1	Unit
02.09.01.022	Alat Laboratorium Makanan	4	Unit
02.09.01.024	Alat Laboratorium Farmasi	3	Unit
02.09.01.028	Alat Laboratorium Proses Peleburan	1	Unit
02.09.01.029	Alat Laboratorium Pasir	7	Unit
02.09.01.037	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	18	Unit
02.09.01.038	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	3	Unit
02.09.01.043	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	20	Unit
02.09.01.046	Alat Laboratorium Pertanian	8	Unit
02.09.01.047	Alat Laboratorium Alat Pertanian A	23	Unit
02.09.01.048	Alat Laboratorium Pertanian B	8	Unit
02.09.01.050	Alat Laboratorium Energi Surya	2	Unit
02.09.01.053	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	2	Unit
02.09.01.054	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	10	Unit
02.09.01.056	Alat Laboratorium Geofisika	1	Unit
02.09.01.058	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	3	Unit
02.09.01.061	Laboratorium Kearsipan	20	Unit
02.09.01.063	Alat Laboratorium Lainnya	37	Unit
02.09.01.064	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	51	Unit
02.09.02	Alat Peraga		
02.09.02.03	Bidang Studi : IPA Dasar	33	Unit
02.09.02.04	Bidang Studi : IPA Lanjutan	5	Unit
02.09.02.05	Bidang Studi : IPA Menengah	9	Unit
02.09.02.10	Bidang Studi : Kesenian	1	Unit
02.09.03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
02.09.03.01	Analytical Instrument	1	Unit
02.09.03.02	Instrument Probe/Sensor	1	Unit
02.09.03.03	General Laboratory Tool	4	Unit
02.09.03.05	Glassware Plastic/Utensils	1	Unit

Kode Barang	Jenis>Nama Barang	Banyaknya	Satuan
02.09.03.06	Laboratory Safety Equipment	3	Unit
02.09.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika		
02.09.04.04	Recorder Display	3	Unit
02.09.04.05	System/Power Supply	1	Unit
02.09.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan		
02.09.05.04	Meteorological Equipment	2	Unit
02.09.06	Radiation Application and Non Destructive testing Laboratory (BATAM)		
02.09.06.03	Peralatan Umum Kedokteran/Klinik Nuklir	4	Unit
02.09.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
02.09.07.01	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	7	Unit
02.09.07.03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	1	Unit
02.09.07.04	Laboratorium Lingkungan	12	Unit
02.09.07.05	Alat Laboratorium Penunjang	16	Unit
02.09.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
02.09.08.07	Permesinan:Model Ship Workshop	1	Unit
02.10.02	Persenjataan Non Senjata Api		
02.10.02.01	Alat Keamanan	5	Buah
03.11.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja		
03.11.01.01	Bangunan Gedung Kantor	1534,92	M2
03.11.01.02	Bangunan Gudang	243,65	M2
03.11.01.03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	97,59	M2
03.11.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	396	M2
03.11.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium	96,10	M2
03.11.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	19	M2
03.11.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	63,12	M2
03.11.01.010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
03.11.01.011	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga		
03.11.01.013	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	107,90	M2
03.11.01.014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	60	M2
03.11.01.019	Bangunan Gedung Perpustakaan		
03.11.01.021	Bangunan Gedung		
	Terminal/Pelabuhan/Bandar		
03.11.01.027	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2165,07	M2
03.11.01.028	Bangunan Sarana Publik	35	M2
03.11.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
03.11.02.02	Rumah Negara Golongan II		
03.11.02.04	Mess/Wisma	277,17	M2
03.11.02.012	Bangunan Rumah Sederhana	40	M2
04.13.01	Jalan		
04.13.01.04	Jalan Desa	2100	M
05.17.03	Barang-Barang Perpustakaan		
05.17.03.01	Peta	10	Peta

Sumber: LKjIP 2022

Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan sarana dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana

dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Pengembangan produksi kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Timur dikelola berdasarkan jenis usaha yang terdiri dari usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum, usaha budidaya ikan di laut, air tawar dan payau. Adapun potensi kelautan dan perikanan yang menunjang pengembangan usaha tersebut adalah sebagai berikut :

2.3.1. Potensi Kelautan dan Perikanan

Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.3 Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

URAIAN	POTENSI
Jumlah Pulau Berpenghuni	22 pulau
Jumlah Pulau Belum Berpenghuni	190 pulau
Luas Wilayah Laut/Perairan Pesisir	2,963,582.41 ha
Panjang Garis Pantai	3,894.27 km
Alur Laut	68,404.39 ha
Kawasan Konservasi	473,919 ha
Kawasan Pemanfaatan Umum	2,421,259.03 ha
Kawasan Strategis Nasional Tertentu	387,360.04 ha
Perikanan Tangkap	
- Laut (Kapal)	22.018 unit
- Perairan Umum (Kapal)	23.660 unit
Perairan Umum	
- Sungai, Danau dan Rawa	2.235.770 ha
- Payau	200.000 ha
Perikanan Budidaya	
- Tambak	82.735,0 ha
- Kolam	3.986,1 ha
- Karamba	12.581,1 ha
- Budidaya Sawah	13,0 ha
- Budidaya laut/pantai	3.210,5 ha

Potensi Sumberdaya perikanan tangkap khususnya di wilayah perairan selat Makassar Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah dikategorikan dalam

kondisi padat tangkap, sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diarahkan pada wilayah perairan Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali Provinsi Kalimantan Timur termasuk WPP-RI 713 yang masih belum dikelola secara optimal.

2.3.2. Kelautan, Pesisir dan Pengawasan

Perairan laut Provinsi Kalimantan Timur yang luas beserta kekayaan alamnya memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumberdaya alam hayati termasuk ikan, rumput laut, mutiara, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumberdaya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi.

Adapun Potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Mangrove

Perlindungan hutan mangrove pada wilayah estuaria sangat penting luas hutan Mangrove Kalimantan Timur 244.437 ha, karena selain mempunyai fungsi ekologis juga ekonomis. Secara ekologis hutan mangrove adalah sebagai penghasil sejumlah besar detritus dari serasah, daerah asuhan (*nursery ground*), mencari makan (*feeding ground*) dan sebagai tempat pemijahan (*spawning ground*). Secara fisik, hutan mangrove dapat berperan sebagai filter sedimen yang berasal dari daratan melalui sistem perakarannya dan mampu meredam terpaan angin badai. Secara ekonomis, dalam konser-vasi hutan mangrove juga akan diperoleh nilai ekonomis sangat tinggi. Nilai ekonomi total rata-rata sekitar Rp 37,4 juta/ha/tahun yang meliputi manfaat langsung (kayu mangrove), manfaat tidak langsung (serasah daun, kepiting bakau, nener bandeng ikan tangkap dan ikan umpan), *option value* dan *existence value*. Upaya konservasi tersebut juga mempunyai nilai dampak positif terhadap sosial-ekonomi bagi masyarakat

yang tinggal di sekitar wilayah estuaria, yaitu mampu memberikan beberapa alternatif jenis mata pencaharian dan pendapatan.

b. Terumbu karang

Ekosistem terumbu karang yang terdiri dari karang penghalang dan karang tepi. Penyebarannya meliputi Perairan Balikpapan, Bontang, Berau, dan beberapa lokasi di pantai Kalimantan Timur. Terumbu karang adalah ekosistem yang produktif karena merupakan *fishing ground* ikan karang. Akibat cara penangkapan ikan yang destruktif, terumbu karang di Provinsi Kalimantan Timur banyak yang mengalami kerusakan. Untuk itu pemerintah provinsi telah mulai melakukan rehabilitasi dengan menanam keranjang-keranjang beton sebagai tempat tumbuh atau perlindungan terumbu karang.

c. Padang Lamun

Ekosistem khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun, luas Padang Lamun Kalimantan Timur 13.119 Ha, terbagi menjadi 3 (tiga) kategori; sehat (Tutupan > 60%) = 6.413,29 Ha (48,89%), Kurang Sehat (30-59,9%) = 6.283,92 Ha (47,90%), Tidak Sehat (<29,9%)=421,83 Ha (3,22%), sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismatales yang beradaptasi di air asin. Padang lamun banyak tumbuh pada daerah relative tenang dan terdapat gugusan karang didepan sebagai penghalang. Tumbuh pada kedalaman 1-6 m dengan substrat pasir halus, pasir lumpur ataupun bercampur dengan sedikit pecahan karang. Ia dapat dianggap sebagai bagian dari ekosistem mangrove, walaupun padang lamun dapat berdiri sendiri. Padang lamun juga dapat dilihat sebagai ekosistem antara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Lamun adalah sumber pakan utama hewan duyung. Awalnya menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan terumbu karang harena sebelum zat-zat halus dan berbahaya menuju permukaan terumbu karang terlebih dahulu disaring oleh padang lamun, selain bermanfaat bagi kelangsungan hidup terumbu karang padang lamun juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia karena dapat di dimanfaatkan sebagai bahan makanan dari alam.

Fungsi padang lamun:

1. Sebagai tempat berkembangbiaknya ikan- ikan kecil dan udang.
2. Sebagai perangkap sedimen sehingga terhindar dari erosi.
3. Sebagai penyedia bahan makanan bagi biota laut.

4. Bahan baku pupuk.

5. Bahan baku kertas.

d. Pulau-pulau Kecil dan Wisata bahari

Provinsi Kalimantan Timur diketahui memiliki kurang lebih 210 pulau-pulau kecil, berada di Paser (5), Penajam Paser Utara (34), Balikpapan (11), Berau (44), Kutai Kartanegara (59), Kutai Timur (29), Kutai Barat (16), Bontang (12). Dari 190 pulau tersebut yang berpenghuni sebanyak 11,58% pulau. Besarnya jumlah pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni mengindikasikan tersedianya potensi wisata taman laut yang masih perawan akan tetapi potensi ini belum digali dan dipromosikan secara optimal. Contohnya wisata bahari di Pulau Derawan, Maratua, dll. Selain potensi wisata taman laut kepulauan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di mempunyai kekayaan dan keragaman yang tinggi dalam bentuk ekosistem, jenis biota, struktur adat dan budayanya. Jumlah lokasi wisata bahari di Provinsi Kalimantan Timur yang sudah dikembangkan.

d. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kawasan pesisir di Provinsi Kalimantan Timur rawan terjadi konflik nelayan serta tindak pidana perikanan, seperti penggunaan alat tangkap terlarang (*trawl*), pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan bahan peledak, potas, pengambilan terumbu karang dan penebangan mangrove dll. Untuk meminimalkan permasalahan tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur saat ini memiliki 1 (*satu*) PPNS dan 1 (*satu*) Polsus yang didukung oleh pengawas Perikanan. Dengan melihat luasan wilayah perairan Provinsi Kalimantan Timur maka jumlah PPNS dan Pengawas Perikanan perlu ditingkatkan secara kuantitas melalui pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan untuk menjadi PPNS. Disamping itu di Provinsi Kalimantan Timur sudah terbentuk 48 kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif yang tersebar di Kabupaten /Kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 58/Men/2001 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas), Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan ditingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Kelompok ini dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat

dalam Pokmaswas, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/petugas.

2.3.3. Capaian Indikator Kinerja

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur periode sebelumnya (2019-2023), sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2021 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Sumber: LKjIP 2022

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK 2022	Target IKK 2022	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	-	-	80	80	81	82	83	84	80	81	82.0	89.4	-	100.00	100.00	100.00	107.71	-
2	Produksi perikanan tangkap (Ton)	8.42 Juta Ton	162,593	152,027	152,027	155,516	158,938	162,593	182,730	152,233	167,042	173,996	177,514	-	100.14	107.41	109.47	109.18	-
3	Produksi perikanan budidaya (Ton)	18.44 Juta Ton	164,441	154,956	154,956	158,055	161,216	164,441	178,961	155,000	160,244	160,240	162,115	-	-	-	-	98.59	-
4	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Milyar Ekor) (Milyar Ekor)	-	-	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	2.6	2.6	2.8	2.7	-	100.00	96.30	100.00	93.10	-
5	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/Ikan Air Laut (Ekor)	-	-	65,000	65,000	70,000	1,232,000	2,264,000	3,797,000	53,206	32,000	732,500	2,075,000	-	81.86	45.71	59.46	91.65	-
6	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (Jenis)	-	-	4	4	4	2	3	4	5	4	2	3	-	125.00	100.00	100.00	100.00	-
7	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan (Sampel)	-	-	200	200	210	220	230	240	200	240	239	310	-	100.00	100.00	108.64	134.78	-
8	Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	47	32	35.28	35.28	37.07	40.74	44.82	47.06	36.87	37.1	40.75	41.39	-	104.51	100.00	100.02	92.35	-
9	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektifn (Ha)	24.2 Juta Ha	-	1	1	1	289,048	297,806	297,806	1	1	289,048	293,031	-	100.00	100.00	100.00	98.40	-

Keterangan :

NSPK : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

IKK : Indikator Kinerja Kunci

*) format sesuai tabel T.C.23 Permendagri 86 Tahun

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4, pencapaian indikator kinerja banyak yang mengalami kenaikan signifikan. Hal ini menjadi perhatian khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan kebijakan agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat tercapai pada akhir periode.

2.3.4. Produksi Kelautan dan Perikanan

Produksi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya secara keseluruhan pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.5. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

No	Kegiatan	2018 (ton)	2019 (ton)	2020 (ton)	2021 (ton)	2022 (ton)
A.	Perikanan Tangkap	158,098.7	152,233	167,042	173,996	177,514
	1. Tangkap Laut	113,975.5	113,164	124,172	129,341	131,956
	2. Tangkap Perairan Umum	44,123.2	39,069	42,870	44,655	33,866
B.	Perikanan Budidaya	117,059.3	155,000	160,244	160,240	162,115
	1. Budidaya Tambak	60,368.2	67,063	69,331	69,329	70,141
	2. Budidaya Kolam	4,363.9	3,783	3,911	3,911	3,957
	3. Budidaya Karamba	43,294.8	67,466	69,748	69,746	70,562
	4. Budidaya Laut/Pantai	9,031.6	6,165	6,373	6,373	6,447
	5. Budidaya Sawah	3.7	10,523	10,880	10,879	11,007
	Kaltim	275,157.1	307,233	327,286	334,236	339,629

2.3.5. Konsumsi Ikan

Nilai konsumsi ikan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6. Angka Konsumsi Makan Ikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					% Peningkatan/ Penurunan
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	$\frac{14}{\text{Rumus } (13-12)/12}$
1	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	48	50	52	54	56	48	52,28	53,18	54,42	56,39	0,16

Sumber: LKjIP 2022

2.3.6. Ekspor Hasil Perikanan

Nilai dan volume ekspor hasil perikanan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.7. Angka Ekspor Hasil Perikanan

NO	TAHUN	NILAI EKSPOR (USD)
1.	2018	35.850.000
2.	2019	36.030.000
3.	2020	32.754.794
4.	2021	76.948.510
5.	2022	37.402.441

Sumber: LKjIP 2022

2.3.7. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan (NTP-Pi) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan/pembudidaya ikan merupakan salah satu indikator kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan di Indonesia. Apabila NTN/NTPi lebih dari 100 maka menurut teori nelayan/pembudidaya ikan seharusnya mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi atau pendapatan nelayan/pembudidaya ikan naik lebih besar dari pengeluarannya. Hal ini menunjukkan pula bahwa perkembangan harga ikan segar yang dihasilkan nelayan/pembudidaya ikan masih lebih tinggi dari harga kebutuhan hidup sehari-hari. Seharusnya dengan tingkat perkembangan harga ikan yang lebih baik dari harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga nelayan/pembudidaya ikan, dapat memberikan dampak terhadap tingkat kesejahterannya. Akan tetapi biasanya harga ikan yang tinggi cenderung berkaitan dengan tingkat produktivitas yang rendah sehingga menyebabkan kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan. Secara logika dengan harga ikan yang tinggi, maka nelayan/pembudidaya ikan dapat meraup lebih banyak pendapatan. Namun hal itu hanya dinikmati oleh sebagian kecil nelayan/pembudidaya ikan saja terutama yang memiliki armada dan alat penangkapan yang lebih modern. Sebaliknya bagi nelayan/pembudidaya ikan tradisional, kenaikan harga tidak bisa dinikmati karena terbatasnya kapasitas barang modal yang rentan terhadap pengaruh cuaca. Bahwa korelasi Nilai Tukar Nelayan/pembudidaya ikan dengan produksi ikan dan harga ikan adalah berbanding lurus. Dengan semakin meningkatnya produksi dan harga ikan maka NTN/NTPi akan meningkat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur salah satunya dengan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili Samarinda, sedangkan indikator tingkat kesejahteraan nelayan maupun pembudidayaan ikan diperoleh dari Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur.

Tabel. 2.8. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	% Peningkatan / Penurunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 Rumus (8-7)/7
1.	Nilai Tukar Nelayan Pembudidaya	NTN	115,20	114,29	102,57	101,77	97,13	-0,66

Angka BPS Kaltim

2.3.8. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 secara teknis dibuat dan disusun melalui analisis terhadap hal yang dijadikan standar pengukuran, yaitu pengukuran kegiatan kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran serta akuntabilitas keuangan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan yang terdapat pada RPD Tahun 2024-2026. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini merupakan tahun keempat RPJMD Kalimantan Timur. Pembandingan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022 yaitu dengan membandingkan capaian kinerja pada Tahun 2021.

Tabel. 2.9. Hasil Evaluasi Akuntailitas Kinerja

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perencanaan Kinerja	30%	19,54	19,68	20,01	20,82	21,42
2	Pengukuran Kinerja	25%	13,44	13,44	13,75	14,38	15,31
3	Pelaporan Kinerja	15%	8,98	10,88	11,10	11,33	11,33
4	Evaluasi Kinerja	10%	3,88	4,25	4,46	4,59	5,83
5	Capaian Kinerja	20%	8,13	11,12	11,00	11,00	11,42
	Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja		53,97 Cukup	59,37 Cukup	60,32 Baik	62,11 Baik	65,30 Baik

Sumber: LHE Inspektorat Kaltim

Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam perencanaan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan indikator kinerja dengan kriteria yang sesuai dengan tugas pokok fungsi per bidang dengan memiliki sasaran yang sesuai dengan tindak lanjut evaluasi Inspektorat Provinsi, satuannya dapat diukur dan dikontrol serta menjadi ukuran keberhasilan kinerja instansi.
- b. Koordinasi dengan Biro Pembangunan Daerah melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (RADALOK), Biro Organisasi melalui Pelaporan Triwulanan dengan input data capaian kinerja Organisasi Perangkat

Daerah pada Aplikasi SIAKIP dan Bappeda Provinsi Kaltim melalui Laporan Triwulanan Pengendalian dan Evaluasi Renja. selain telah dilakukan guna review penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim, hal ini dilakukan untuk menggali dan memperoleh informasi guna penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan tata cara penyusunan laporan kinerja.

- c. Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan pengukuran kinerja atas capaian kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, data dilaporkan secara berjenjang berdasarkan indikator kinerja eselon III dan IV dan dapat mengindikasikan tujuan, sasaran dan hasil program/kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Untuk mempermudah proses pengukuran kinerja serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam suatu kegiatan, Indikator Kinerja Utama dalam Renstra DKP Provinsi Kaltim telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan baik APBN dan APBD.

2.3.9. Realisasi Anggaran

Perencanaan anggaran harus dirumuskan sedemikian rupa agar dalam pendanaan program kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dengan upaya pencapaian tema pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan, tabel dibawah ini menunjukkan gambaran pendanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. *(Terlampir Realisasi Anggaran)*

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui 6 Program, 41 Kegiatan, 108 Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran APBD setelah perubahan sebesar **Rp. 97,589,991,747,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 83,151,933,172,-** dengan persentase capaian sebanyak **85,21%**. Sedangkan untuk anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 25,055,870,223,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 19,348,033,522,-**. Sedangkan anggaran APBN tahun 2020 dengan 6 program dan 68 kegiatan melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar **Rp. 1.758.723.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.748.542.232,-** dengan persentase capaian sebanyak **99,42%**.

Tabel. 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim (sesuai tabel T-C.24 Permendagri 86/2021)

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (DINAS DAN UPTD)	36,651,420,279	36,950,828,753	40,216,697,000	47,158,498,797	48,691,412,075	31,092,698,917	31,983,800,341	35,424,974,012	39,826,622,074	11,496,812,757	84.83	86.56	113.53	118.41	423.52	0.08	(0.10)
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3,312,885,000	1,431,225,000	3,629,995,000	3,986,235,800	4,296,458,400	2,965,431,551	1,236,487,890	3,449,833,835	3,855,107,558	734,327,702	89.51	86.39	105.22	103.40	585.09	0.14	(0.08)
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	17,156,600,680	3,401,375,000	21,616,945,000	25,808,566,657	23,868,165,500	15,416,842,418	2,926,020,901	17,179,335,544	21,251,309,706	2,299,386,894	89.86	86.02	125.83	121.44	1,038.02	0.20	(0.07)
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (DINAS DAN UPTD)	6,753,910,000	5,041,956,000	10,755,360,000	14,813,520,593	11,008,291,134	6,253,664,003	4,221,468,707	10,503,571,175	13,172,435,724	750,481,430	92.59	83.73	102.40	112.46	1,466.83	0.19	(0.03)
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,132,570,050	1,211,904,500	3,300,000,000	3,874,920,000	3,735,029,400	1,942,425,300	1,083,730,757	2,761,498,727	3,298,339,288	702,777,281	91.08	89.42	119.50	117.48	531.47	0.21	(0.01)
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (DINAS DAN UPTD)	371,544,000	146,165,000	1,409,000,000	1,948,249,900	1,942,504,500	304,710,500	133,693,800	899,538,999	1,748,118,822	407,269,544	82.01	91.47	156.64	111.45	476.96	0.42	0.26
TOTAL		66,378,930,009	48,183,454,253	80,927,997,000	97,589,991,747	93,541,861,009	57,975,772,689	41,585,202,396	70,218,752,292	83,151,933,172	16,391,055,608							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur guna menghasilkan strategi, dengan uraian sebagai berikut :

a. Tantangan meliputi :

1. Atasi pengangguran, karena di Kalimantan Timur jumlah angkatan kerja, dengan jumlah lapangan pekerjaan masih belum seimbang.
2. Pembangunan infrastruktur perekonomian, terutama jalan, jembatan dan pelabuhan.
3. Pemberdayaan ekonomi rakyat semakin ditingkatkan, terutama memperhatikan pada sektor riil, sektor informal dan UKM. Begitu pula perlunya mengurangi keterbatasan akses permodalan.
4. Kemandirian/kecukupan pangan dalam rangka ketahanan pangan.
5. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan memperbaiki iklim investasi.
6. Terjadinya penurunan stok Sumberdaya Ikan, khususnya di WPP 713 (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali) dan WPP 716 (Laut Sulawesi).
7. Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan yang belum merata.
8. Keterbatasan bahan baku perikanan untuk bahan baku industri.
9. Tuntutan Penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan.

b. Peluang meliputi :

1. Dukungan Pemerintah pada sub sektor kelautan dan perikanan semakin besar.
2. Teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan yang semakin berkembang.
3. Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil kelautan dan perikanan semakin tinggi;
4. Makin bertambahnya pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Kelautan dan perikanan merupakan bidang yang vital dalam perekonomian bangsa Indonesia, sudah sepatutnya pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah memperhatikan dan mengembangkan kelautan dan perikanan menjadi sektor yang strategis untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat lokal. Adapun isu-isu dan problematikanya seharusnya dapat diselesaikan secara seksama dengan melibatkan semua komponen agar dapat diselesaikan secara cepat dan cermat. Peluang perkembangan kelautan dan perikanan Indonesia adalah adanya potensi pengembangan terkait sumber daya dan teknologi serta prospek pengembangan terkait dengan pasar internasional dan domestik. Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pembangunan kelautan dan perikanan maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dibagi menjadi 4 (empat) **ASPEK**: (1) Sumber Daya Manusia; (2) **Ekonomi Wilayah**; (3) Lingkungan Hidup; (4) Tata kelola pemerintahan; dari keempat aspek tersebut sektor kelautan dan perikanan masuk pada poin 2 (dua) dalam hal dimaksud tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan produksi, pengawasan sumber daya, pengelolaan ruang laut dan peningkatan daya saing produk serta pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sektor kelautan dan perikanan mempunyai peranan cukup strategis dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur diluar sektor pertambangan baik migas maupun non migas. Perkembangan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur terus memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian daerah dan masyarakat lokal. Tetapi pada kenyataannya, sektor kelautan dan perikanan masih mempunyai beberapa permasalahan, antara lain budidaya ikan yang masih terbatas pada komoditas utama/konvensional, usaha penangkapan dan budidaya ikan masih diusahakan secara sederhana/tradisional, produktivitas perikanan umumnya masih dibawah potensi, mutu produksi kelautan dan perikanan yang masih rendah karena kurang didukung oleh unit pengolahan yang efisien dan terbatas, serta belum optimalnya kelembagaan nelayan/pembudidaya/pengolah hasil perikanan. Jika dipetakan secara lebih rinci akar masalah dan masalah pokoknya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah “Belum Terwujudnya Peran Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan secara Ekonomis, Ekologis dan Sosial-Budidaya”.

Permasalahan pokok tersebut muncul karena adanya berbagai indikasi permasalahan yang ada disetiap unit kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Satu diantara kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan sektor kelautan dan perikanan secara baik dan akuntabel menjadi satu diantara permasalahan yang belum terselesaikan. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas secara prosedural, namun untuk menghasilkan perencanaan kelautan dan perikanan yang lebih berkualitas, Dinas Kelautan dan Perikanan masih harus berusaha mengembangkan kualitas perencanaan yang dapat melakukan analisis dan kajian mendalam terkait pengelolaan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur.

Namun demikian, permasalahan kelembagaan pemerintah masih

menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan kerjasama sinergis (dan pembagian kerja) antar pengampu kepentingan yaitu pemerintah atau masyarakat politik secara umum (*political society*), dunia usaha atau masyarakat bisnis (*business society*) dan masyarakat madani (*civil society*).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan benar-benar berjalan secara baik dan efisien. Kondisi ini sangat diperlukan, apalagi dalam menghadapi krisis multi dimensi yang terjadi saat ini. Kelembagaan yang masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertanggung struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Kelembagaan nelayan/pembudidaya/pengolah perikanan masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan “**belum optimalnya kapasitas kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Kelembagaan yang menjamin keberpihakan kepada pelaku usaha perikanan masih lemah.
- b. Masih lemahnya kelembagaan pengembangan komoditas dan pemasaran perikanan.
- c. Pengembangan iptek yang dibutuhkan oleh dunia usaha belum optimal
- d. Data dan informasi bidang kelautan dan perikanan belum berkembang
- e. Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana prasarana.

2. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap

Satu diantara tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta memperbaiki mutu hasil perikanan. Diharapkan dari peningkatan tersebut akan meningkatkan pendapatan, memperbesar perdagangan antar pulau dan ekspor serta memperluas kesempatan kerja. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan mengalami perkembangan yang semakin pesat dan diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan produksi, kebutuhan ekspor yang berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan, ekonomi lokal dan timbulnya *multiplier effect* secara sektoral

maupun spasial baik nasional, regional maupun lokal.

Dalam pengembangan produksi perikanan budidaya, Kalimantan Timur masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional, dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap adalah disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil. Melihat kondisi ini diperlukan percepatan pengembangan industri perikanan di daerah. Untuk percepatan ini pengembangan ini perlu dukungan pemerintah maupun swasta. Deregulasi juga dinilai perlu sehingga pemerintah diminta tidak hanya mengedepankan hukuman, dimana agar optimalisasi sumber perikanan tangkap bisa tercapai.

Ketersediaan dalam penyaluran BBM subsidi untuk nelayan masih belum optimal. Sulitnya menetapkan jumlah kebutuhan BBM yang tepat bagi kapal-kapal ikan dikarenakan sulitnya mendapatkan data kapal dan data operasional terkait dengan dokumen kapal yang valid. Alokasi yang diberikan untuk SPDN (*Solar Package Dealer Nelayan*) seringkali sudah habis dipertengahan bulan, terkait dengan musim melaut nelayan. Skema pembelian BBM oleh nelayan, umumnya BBM dibeli oleh juragan yang selanjutnya menyuplai paket BBM dan sembako kepada nelayan. Dinamika ketersediaan BBM ini juga menjadi satu diantara permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produktivitas perikanan.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan "**belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap**"dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya ketersediaan bibit dan benih unggul
- b. Belum optimalnya penanggulangan terhadap hama dan penyakit ikan serta jaringan irigasi tambak
- c. Kecenderungan peningkatan harga pakan pabrikan untuk usaha budidaya
- d. Armada penangkapan ikan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil
- e. Regulasi/aturan penangkapan ikan yang selalu berubah-ubah
- f. Ketersediaan BBM subsidi untuk nelayan masih belum sesuai kebutuhan

3. Belum optimalnya pengembangan nilai tambah dan pemasaran produk kelautan dan perikanan

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan perdagangan produk hasil kelautan dan perikanan. Dilihat dari berbagai aspek seperti potensi sumber daya yang dimiliki dan arah kebijakan pembangunan, Kalimantan Timur memiliki prospek untuk mengembangkan agribisnis kelautan dan perikanan, sayangnya agribisnis yang ada belum berdaya saing. Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi pemutar roda ekonomi daerah menggantikan sektor tambang.

Dalam era otonomi daerah, komoditas kelautan dan perikanan memerlukan komitmen pemerintah daerah agar mampu bersaing di pasar internasional. Pelaku bisnis merupakan institusi yang menjembatani kebijakan makro dan regional atau antara kebijakan sektor/subsektor dan antar daerah penghasil untuk dioperasionalkan. Tata kelola sistem dan usaha agribisnis kelautan dan perikanan Kalimantan Timur saat ini masih belum digarap dengan maksimal. Satu diantara kendala utama adalah infrastruktur di Kalimantan Timur yang masih jauh dari kata bagus, hal ini membuat industri hilir urung diminati oleh investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur. Selain itu kurangnya tenaga penyuluh perikanan juga menjadi kendala dalam pengelolaan sistem agribisnis. Penyuluh perikanan merupakan ujung tombak di lapangan karena memiliki fungsi fasilitator, mediator dan pemberdayaan masyarakat.

Nelayan/pembudidaya selaku utama di sektor kelautan dan perikanan belum mendapat kemitraan yang baik dengan pelaku usaha/pengolah produk hasil perikanan. Sesungguhnya hal ini penting dilakukan sebagai langkah memudahkan pemasaran hasil komoditi kelautan dan perikanan. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil hasil komoditi kelautan dan perikanan akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau

pembeli, sehingga hasil komoditi kelautan dan perikanan terjamin pemasarannya. Selama ini banyak permasalahan yang terjadi ditingkat pelaku utama (nelayan/pembudidaya) karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya. Sulitnya pemasaran ini bukan hanya dikarenakan dukungan infrastruktur yang belum tersedia dengan baik, juga disebabkan karena para nelayan/pembudidaya belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dilakukan khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi kelautan dan perikanan dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan **“belum optimalnya pengembangan nilai tambah dan pemasaran produk kelautan dan perikanan”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan
- b. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern
- c. Masih banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil perikanan yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- d. Minimnya kerjasama bidang usaha perikanan
- e. Inovasi peningkatan produk hasil perikanan belum berkembang
- f. Mutu produk hasil perikanan yang masih rendah
- g. Tenaga pendamping perikanan belum diberdayakan secara optimal
- h. Kecukupan jumlah Penyuluh Perikanan tidak sebanding dengan luas wilayah kerja

4. Belum optimalnya pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berbasis rendah emisi

Pemanasan global (*global warming*) merupakan peningkatan temperatur atmosfer bumi akibat meningkatnya intensitas efek rumah kaca (*green house effect*) pada atmosfer bumi. Peningkatan intensitas efek rumah kaca tersebut disebabkan meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti *Green House Gas* (GHG). Pemanasan global antara lain berdampak pada perubahan iklim global berupa pergeseran peta iklim secara global, anomali iklim, banjir, kekeringan, badai dan kenaikan permukaan laut yang banyak menimbulkan kerugian dan mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi. Kondisi ini menyebabkan banyak hambatan pengembangan kelautan dan perikanan, khususnya di Kalimantan Timur. Isu pemanasan global sepatutnya dapat

diatasi apabila ada koordinasi antara pemerintah daerah, pusat dan *stakeholder* yang berkepentingan.

Pengelolaan kawasan konservasi kelautan dan perikanan khususnya kawasan mangrove memiliki fungsi ekologis yang menyerupai fungsi ekologis hutan, maka kawasan mangrove perlu dikategorikan sebagai hutan.

Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di Kalimantan Timur. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan permukaan air laut (*sea level rise*) yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan keterbatasan lahan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali.

Dengan analisis permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan **“belum optimalnya pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berbasis rendah emisi”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut:

- a. Makin besarnya luas lahan kritis akibat pembukaan usaha perikanan
- b. Masih banyaknya lahan budidaya khususnya tambak yang ditelantarkan setelah pembukaan hutan mangrove
- c. Belum terintegrasi tata ruang wilayah laut dan darat, agar pengembangan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan peruntukan yang disusun berdasarkan karakteristik wilayah tanpa mengorbankan kepentingan lingkungan
- d. Belum tersedianya sistem perhitungan dan pengelolaan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan

Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Kalimantan Timur yang berpotensi mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Selain itu praktik-praktik (*Illegal Unreported and Regulated*) IUU Fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 dan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716, baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia maupun oleh kapal-kapal perikanan asing menyebabkan kerugian baik aspek sosial, ekologi/lingkungan maupun ekonomi.

Ancaman *IUU Fishing* dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa wilayah penangkapan ikan terjadi penurunan stok ikan, mengacu pada Permen KP nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Disisi lain kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Timur masih lemah, seiring dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pelimpahan kewenangan pengawasan perikanan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi.

Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan kerjasama secara intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan dalam penanggulangan kegiatan *IUU Fishing*.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan "**ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan**"dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan
- b. Belum optimalnya pengawasan *Illegal Unreported dan Unregulated Fishing*

- c. Masih terjadi konflik sosial antar nelayan andon dan pelaku usaha non perikanan
- d. Makin maraknya kegiatan *Illegal Unreported dan Unregulated Fishing*

Dari analisa diatas, permasalahan yang dihadapi Dinas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel pemetaan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kendala Utama (Strategis)			
1.	Belum optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana	Belum optimalnya produksi perikanan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Armada penangkapan ikan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil b. Regulasi/aturan penangkapan ikan yang selalu berubah-ubah c. Ketersediaan BBM subsidi untuk nelayan masih belum sesuai kebutuhan d. Kepatuhan terhadap perijinan perikanan tangkap masih minim
2.		Belum optimalnya produksi budidaya perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan terhadap hama dan penyakit ikan masih lemah b. Kerusakan jaringan irigasi tambak akibat sedimentasi c. Tingginya harga pakan pabrikan untuk usaha budidaya perikanan d. Pengembangan komoditas budidaya unggulan belum maksimal e. Kelembagaankelompok pembudidaya (SDM dan Bimtek) belum optimal f. Sarana dan Prasarana Budidaya belum optimal
3.	Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah	Belum optimalnya pengembangan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya konsumsi makan ikan b. Sistem promosi pasar belum berinovasi dan modern

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>c. Promosi kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) belum optimal</p>
4.	<p>Pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya ikan belum optimal</p>	<p>Belum optimalnya pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berbasis rendah emisi</p>	<p>a. Makin besarnya luas lahan kritis akibat pembukaan usaha perikanan b. Masih banyaknya lahan budidaya khususnya tambak yang telah dibiarkan setelah pembukaan hutan mangrove c. Belum adanya kejelasan konsep tata ruang wilayah agar pengembangan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan peruntukan yang disusun berdasarkan karakteristik wilayah tanpa mengorbankan kepentingan lingkungan d. Belum tersedianya sistem perhitungan dan pengelolaan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>
5.	<p>Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum Perikanan</p>	<p>Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan</p>	<p>a. Minimnya sarpras dan SDM untuk operasional pengawasan terhadap <i>IUU Fishing</i> dan <i>Destructive Fishing</i> b. Terjadinya konflik sosial antara nelayan andon dan pelaku usaha non perikanan d. Kurangnya edukasi terhadap para pelaku perikanan akan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan e. Lemahnya tata kelola pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan (pembudidaya, nelayan dan pengolahan hasil perikanan)</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>f. Speed boat yang ada belum bisa menjangkau seluruh area pengawasan yaitu sampai 12 mil</p> <p>g. Jumlah pengawas yang masih kurang</p>
6.	ya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah	Belum optimalnya mutu produk hasil perikanan	<p>a. Pengawasan mutu produk hasil perikanan masih kurang</p> <p>b. Masih banyaknya UKM hasil perikanan yang belum memiliki SKP</p> <p>c. Penerapan mutu produk hasil perikanan belum berkembang</p>
7.	Belum optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melalui peningkatan produksi perikanan (budidaya), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana	Belum optimalnya ketersediaan komoditas perikanan unggulan (udang windu) dan ikan air payau/laut	<p>a. Pengembangan sarpras dan komoditas benih unggulan belum maksimal</p> <p>b. Keterbatasan jumlah pasokan benih unggul daerah</p> <p>c. Ketergantungan induk unggulan dari daerah lain</p>
8.		Belum optimalnya ketersediaan komoditas perikanan yang spesifik	<p>a. Pengembangan sarpras dan komoditas benih spesifik belum maksimal</p> <p>b. Keterbatasan jumlah pasokan benih lokal</p>
Kendala Penunjang (Operasional Perkantoran)			
9.	Belum optimalnya pelayanan, penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan yang kompetensi dan sarana, prasarana yang memadai serta kualitas akuntabilitas kinerja belum maksimal	Belum optimalnya kualitas pelayanan perkantoran	<p>a. Masih rendahnya pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>b. Dukungan dana operasional perkantoran masih rendah</p>
10.		Belum optimalnya sarana dan prasarana ASN	<p>a. Masih rendahnya infrastruktur sarana prasarana ASN</p> <p>b. Kualitas fasilitas ruang kerja/arsip yang belum memadai</p>
11.		Belum optimalnya kualitas sumber daya ASN	<p>a. Masih rendahnya dukungan dana pengembangan SDM</p> <p>b. Perlunya peningkatan IPTEK SDM</p> <p>c. Rendahnya disiplin budaya kerja</p>
12.		Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja PD	<p>a. Data dan informasi bidang pembangunan kelautan dan perikanan</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			belum berkembang b. Capaian kinerja program/ kegiatan belum maksimal

3.2. Slogan, Tema dan Prioritas Pembangunan

Sesuai RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, Slogan Pembangunan **“MEMBANGUN KALTIM UNTUK NUSANTARA”**, sedangkan Tema Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah :

1. 2024:

Peningkatan daya saing sdm dan infrastruktur wilayah yang andal untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan.

2. 2025:

Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing.

3. 2026:

Pemantapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN

Upaya pencapaian Tema tersebut, ada 8 (delapan) Prioritas Pembangunan, berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya;
- 3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan;**
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Dari tema pembangunan di atas tampak jelas bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan berhubungan dengan prioritas pembangunan ketiga. Berkaitan

dengan prioritas pembangunan tentang pengembangan ekonomi kerakyatan, Dinas Kelautan dan Perikanan harus mampu mendefinisikan bagaimana produktivitas kelautan dan perikanan dapat dikembangkan untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan.

Dengan pengelolaan yang maksimal terhadap hasil (produk) kelautan dan perikanan akan memberikan daya dukung dalam meningkatkan daya saing produk yang berimbas pada perekonomian daerah. Dengan disiplin yang tinggi agar kelautan dan perikanan juga dirasakan oleh masyarakat maka keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam prioritas pembangunan ketiga pada RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026. Dengan pemanfaatan yang optimal, baik pemanfaatan sebagai bahan baku energi terbarukan maupun sebagai produk mentah dengan tanpa meninggalkan keseimbangan lingkungan akan mampu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Timur.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

A. Visi

Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) yaitu dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**.

B. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. **Kedaulatan (Sovereignty)** yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (Sustainability)** yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)** yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

C. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-perundangan, serta tugas KKP yang dimandatkan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan KKP disusun sebagai berikut :

1. **Kebijakan Pokok**

- a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-1 dan ke-4 serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kedaulatan.
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-6 dan ke-7 serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-6 dan ke-7 serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan.

2. **Kebijakan Lintas Bidang**

- a. Pengarusutamaan Gender.
- b. Pembangunan Kewilayahan.
- c. Adaptasi Perubahan Iklim.
- d. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan menjadi satu daintara ujung tombak penciptaan *blue economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

a. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan menjadi satu daintara ujung tombak penciptaan *blue economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

1. Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi daratan seluas 12,73 Juta Ha terdiri dari 10 Kabupaten/Kota, wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai, ruang di dalam bumi serta wilayah udara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak Malaysia

2. Kawasan peruntukan perikanan merupakan kawasan minapolitan, kampung budidaya dan *Major Project* meliputi:
 - Peruntukan Perikanan Tangkap (Kota Samarinda) sesuai Perda Kota Samarinda No.2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda 2014-2034
 - Peruntukan Perikanan Tangkap (Kabupaten Kutai Kartanegara) sesuai SK Bupati No.234/SK-BUP/HK/2011
 - Peruntukan Pengembangan Kampung Budidaya (Berau dan Kutai Kartanegara) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 47 Tahun 2021 tentang Kampung Budidaya
 - Peruntukan *Major Project* Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya (Berau, Penajam Paser Utara, Paser, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur).
3. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi :
 - Pengembangan komoditas utama perikanan meliputi ikan laut dan ikan perairan umum daratan adalah (a). Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Sungai Pinang di Kota Samarinda; (b). Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Barat dan Balikpapan Selatan di Kota Balikpapan; (c). Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara di Kota Bontang; (d). Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur; (e). Kecamatan Penajam dan Babulu di Kabupaten Penajam Paser Utara; (f). Kecamatan Derawan, Talisayan, Maratua, Biduk-Biduk dan Batu Putih di Kabupaten Berau; (g). Kecamatan Tanjung Harapan di Kabupaten Paser; (h). Kecamatan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi PPI Manggar di Kota Balikpapan, PPI Selili di Kota Samarinda, PPI Tanjung. Limau di Kota Bontang, PPI Api-Api di Kabupaten Penajam Paser Utara, PPI Sambaliung di Kabupaten Berau, PPI Sengata di Kabupaten Kutai Timur.
4. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi pengembangan komoditas utama perikanan meliputi ikan air laut dan ikan air tawar serta rumput laut adalah (a). Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara; (b). Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat di Kota Balikpapan; (c). Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Tenggarong, Loa Kulu, Muara Muntai, Kota Bangun,

Kenohan, Muara Wis, Muara Kaman, Sebulu, Tabang, Loa Janan, Tenggarong Seberang dan Kembang Janggut di Kabupaten Kutai Kartanegara; (d) Kecamatan Batu Engau, Batu Sopang, Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Muara Samu, Paser Balengkong, Tanah Grogot dan Tanjung Harapan di Kabupaten Paser; (e). Kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan dan Bontang Barat di Kota Bontang; (f). Kecamatan Batu Putih, Biantan, Biduk-Biduk, Derawan, Gunung Tabur, kelay, Maratua, Sambaliung, Segah, Tabalar, Talisayan, Tj. Redeb dan Teluk Bayur di Kabupaten Berau; (g). Kecamatan Batu Ampar, Bengalon, Busung, Kaliorang, Karangan, Kaubun, Kong Beng, Long Masengat, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Muara Wahau, Rantau Pulung, Sandaran, Sangata Utara, Sangata Selatan, Sangkulirang, Telen dan Teluk Pandan di Kabupaten Kutai Timur; (h). Kecamatan Barong Tongkok, Bentian Besar, Bongan, Damai, Jempang, Laham, Linggang Bigung, Long Apari dan Long Bagun di Kabupaten Kutai Barat; (i) Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sambutan, Sungai Kunjang dan Sungai Pinang di Kota Samarinda; (j). Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung dan Laham di Kabupaten Mahakam Ulu.

5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau.
6. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan meliputi :
 - Menjaga kelestarian, rehabilitasi dan revitalisasi tanaman bakau/mangrove dan terumbu karang.
 - Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
 - Penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri.
 - Pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil.
 - Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan.
 - Peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
 - Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan juga turut memperhatikan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan dimasa yang akan datang. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di pedesaan dan pesisir.

Isu-isu strategis KLHS yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan adalah alih fungsi lahan (hutan dan pertanian); perubahan iklim; penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam; belum optimalnya pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; kesejahteraan rakyat; pertanian dan ketahanan pangan. Dalam proses penyusunan KLHS, implementasi program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dinilai telah berkontribusi untuk menjawab isu-isu KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu (1) Peningkatan daya saing sumber daya manusia; (2) Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; (3) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur; (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan (5) Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan poin 2 (dua) **Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.**

a. Isu Lingkungan

Isu yang muncul pada isu lingkungan merupakan indikasi dibutuhkan tindakan rehabilitasi atau konservasi dalam menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Timur. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

- Degradasi kondisi ekosistem lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil

- *Over fishing* akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat
- Pemanfaatan yang kurang bertanggungjawab seperti penggunaan bahan peledak dan kimia dalam kegiatan penangkapan
- Masih maraknya pencurian terumbu karang dan penebangan mangrove

b. Isu Kebijakan

Isu kebijakan ini muncul dikarenakan beberapa hal antara lain :

- Lemahnya implementasi suatu peraturan terkait perlunya pembatasan perijinan baru kapal ikan di atas 6 GT
- Ketersediaan petugas syahbandar perikanan tidak sebanding dengan luas wilayah kerja

Masih perlunya penyesuaian dalam hal implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Lemahnya implementasi terkait kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik

c. Isu Kelembagaan

Isu yang teridentifikasi adalah :

- Penguatan kelembagaan masyarakat/pemberdayaan kelompok masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Konflik antar nelayan (nelayan skala besar dengan nelayan skala kecil/nasional)
- Rendahnya pemahaman hukum sektor kelautan dan perikanan serta penegakannya.
- Perlunya penguatan kapasitas UPT Pusat, UPT Provinsi/Kab/Kota, serta Balai Riset.
- Perlunya penguatan kapasitas kelompok usaha bidang kelautan dan perikanan
- Optimalisasi tingkat kesejahteraan masyarakat perikanan di Kalimantan Timur.

d. Isu Infrastruktur

Pada isu kelompok infrastuktur teridentifikasi isu terkait minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan produksi, sistem informasi dan distribusi hasil tangkapan, tidak efisiennya proses produksi dan distribusi hasil tangkapan. Secara detail, isu yang teridentifikasi mencakup :

- Minimnya sarana dan prasarana di wilayah kepulauan.
- Restrukturisasi armada perikanan tangkap.
- Belum optimalnya fungsi dan peran Pelabuhan Perikanan.

e. Isu Ketahanan Pangan

Isu ini muncul mencakup di bidang budidaya perikanan dikarenakan untuk mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan adanya peningkatan produksi dari budidaya perikanan sebagai tumpuan utama, mengingat sumberdaya ikan di laut teritorial sebagai komoditas utama perikanan tangkap sedang mengalami penurunan stok. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

- Harga komoditas fluktuatif.
- Tingginya harga pakan berimbang terhadap tingginya ongkos produksi budidaya, terutama budidaya air tawar.
- Masalah kawasan pesisir sudah rusak dan disebabkan penggalian pasir yang bersifat masif untuk itu sulit dikembangkan usaha kegiatan budidaya perikanan.
- Perlunya pengembangan budidaya ikan skala kecil/rumah dan penataan pemasaran.
- Menurunnya kualitas mutu benih dan induk ikan yang beredar di masyarakat.
- Masih rendahnya minat pelaku usaha budidaya/Pokdakan untuk sertifikasi unit usahanya bagi keperluan *food safety* dan jaminan mutu.
- Kurangnya kepatuhan/ketaatan penerapan standarisasi jaminan mutu di UPI, khususnya skala UMKM.
- Masih terbatasnya bahan baku ikan untuk industri pengolahan ikan.
- Maraknya alih fungsi lahan terutama untuk budidaya perikanan.
- Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu.

f. Isu Pendanaan

Isu kelompok pendanaan didominasi oleh sumber dana dalam mengatasi permasalahan dalam perikanan adalah :

- Belum optimalnya sumber-sumber dana yang berasal dari perusahaan (*Coorporate Social Responsibility*).
- Identifikasi potensi sumber dana dari Pemerintah Pusat (APBN/DAK) untuk mendukung pelaksanaan isu strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan.

- Adanya dukungan sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Identifikasi jenis-jenis pendanaan dari pemerintah pusat yang berasal dari kebijakan subsidi.
- Identifikasi dan pemanfaatan sumberdaya dari swadaya masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, pemerintah telah menetapkan cetak biru kebijakan kelautan Indonesia 2021-2025 yang berbasis pada konsep ekonomi biru (*blue economy*). Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Timur adalah Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan berdasarkan penerapan konsep *blue economy*. Konsep *blue economy* berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi. Dengan kata lain, *blue economy* tidak semata-mata melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sangat menekankan kepada vitalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem bahari, konsep *blue economy* selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan laut, juga akan dapat membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional karena distribusi pertumbuhan ekonomi perikanan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah melalui transformasi sektor kelautan dan perikanan.

Transformasi utama dari penerapan *blue economy* meliputi lima kebijakan prioritas yaitu :

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan yang terukur berbasis kuota;
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pembersihan sampah plastik melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Melalui kebijakan prioritas tersebut, maka penyelarasan akselerasi program terobosan perlu dilakukan adalah implementasi program yang mendukung semua pengelolaan kelautan dan perikanan yang berbasis ekologi dan keberlanjutan.

Blue Economy sejalan dengan *Blue Carbon* dimana Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 54.716 km dan luas perairan lautnya sekitar 5,8 juta kilometer. Luasnya perairan laut Indonesia memberikan berkah potensi *blue carbon* Indonesia mencapai 3,4 giga ton (GT) atau 17% dari *blue carbon* dunia.

Blue carbon tersebar dalam ekosistem mangrove, hutan bakau dan padang lamun. Pelestarian ekosistem ini akan memberikan manfaat penyerapan emisi karbon.

Manfaat Blue Carbon Secara umum seharusnya dapat dipahami bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh kita tentu akan menghasilkan residu secara langsung maupun tidak langsung. Seluruh makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan, tentu kita secara alamiah akan menghasilkan karbon dan secara alamiah pula karbon tersebut akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ekosistem karbon biru merupakan penyerap karbon paling efektif dibandingkan ekosistem lain. Lingkungan pesisir berperan besar dalam menyelamatkan umat manusia bahkan bumi dari dampak perubahan iklim yang kian memburuk. Pelestarian ekosistem karbon biru menjadi solusi alami terbaik sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim yang dipicu oleh efek rumah kaca atau peningkatan jumlah CO₂ dan beberapa gas lain, menyebabkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Kondisi tersebut menjadi pemicu mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem baik akibat kebakaran dan kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut sehingga daratan akan tenggelam. Beberapa efek rumah kaca tersebut tentu sangat merugikan dan berbahaya apabila tidak segera diperbaiki. Menjaga kelestarian ekosistem pesisir baik hutan mangrove, bakau, lamun, lahan gambut dan rawa asin dapat memberi manfaat untuk mencegah erosi, melindungi perumahan warga ketika pasang surut, badai dan banjir ketika menghantam, menangkap polutan yang kerap ada di udara dan perairan, dan menjadi habitat bagi makhluk hidup yang terkhusus berada di wilayah pesisir. Selain itu, ekosistem karbon biru dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai sumber ekonomi dengan memberikan servis ekologi. Pengelolaan daerah pesisir dapat menjadi daya tarik dan berpotensi wisata yang menarik pengunjung Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen memperluas kawasan konservasi laut sampai dengan 30% dari total kawasan perairan Indonesia. Salah satu hal inilah menjadikan Kalimantan Timur juga merupakan paru-paru dunia, yang mana perannya sangat penting dalam program penurunan emisi karbon. Kalimantan Timur memiliki luas laut 4,54 juta Ha yang terdiri dari 109.832 Ha merupakan pengelolaan perikanan budidaya dan 3.854 Ha wilayah penangkapannya serta didukung pula dengan 217.302 Ha luas lahan hutan bakau/mangrove.

Manfaat *Blue Carbon* Secara umum seharusnya dapat dipahami bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh kita tentu akan menghasilkan residu secara

langsung maupun tidak langsung. Seluruh makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan, tentu kita secara alamiah akan menghasilkan karbon dan secara alamiah pula karbon tersebut akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ekosistem karbon biru merupakan penyerap karbon paling efektif dibandingkan ekosistem lain. Lingkungan pesisir berperan besar dalam menyelamatkan umat manusia bahkan bumi dari dampak perubahan iklim yang kian memburuk. Pelestarian ekosistem karbon biru menjadi solusi alami terbaik sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim yang dipicu oleh efek rumah kaca atau peningkatan jumlah CO₂ dan beberapa gas lain, menyebabkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Kondisi tersebut menjadi pemicu mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem baik akibat kebakaran dan kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut sehingga daratan akan tenggelam. Beberapa efek rumah kaca tersebut tentu sangat merugikan dan berbahaya apabila tidak segera diperbaiki. Menjaga kelestarian ekosistem pesisir baik hutan mangrove, bakau, lamun, lahan gambut dan rawa asin dapat memberi manfaat untuk mencegah erosi, melindungi perumahan warga ketika pasang surut, badai dan banjir ketika menghantam, menangkap polutan yang kerap ada di udara dan perairan, dan menjadi habitat bagi makhluk hidup yang terkhusus berada di wilayah pesisir. Selain itu, ekosistem karbon biru dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai sumber ekonomi dengan memberikan servis ekologi. Pengelolaan daerah pesisir dapat menjadi daya tarik dan berpotensi wisata yang menarik pengunjung

Konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dibagi menjadi 4 (empat) aspek, terdiri dari; Sumber Daya Manusia, Ekonomi Wilayah, Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Pemerintahan, dari keempat aspek tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai salah satu upaya penting guna mewujudkan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada sub sektor Kelautan dan Perikanan, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu (1) Peningkatan daya saing sumber daya manusia; (2) Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; (3) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur; (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan (5) Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Dalam mewujudkan Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan menindaklanjuti perwujudan tema tersebut sebagaimana terdapat dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026.

Adapun Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada RPD 2024-2026 yang menjadi perwujudan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai tema pembangunan adalah :

Prioritas Pembangunan 3 : Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan

Langkah-langkah yang diambil dalam penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Ketiga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan “**Tujuan Renstra**” untuk pelaksanaan pembangunan tiga tahun kedepan dengan mengambil sasaran pelaksanaan yang menjadi kewenangannya dalam RPD tahun 2024-2026 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan Renstra DKP Prov Kaltim :

- 1. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas**
- 2. Meningkatnya Peran Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk mewujudkan Tujuan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, diambil beberapa Sasaran untuk terwujudnya kemandirian ekonomi melalui sektor Kelautan dan Perikanan, diantaranya adalah :

- SASARAN** :
1. Meningkatnya produksi, kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan
 2. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan
 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah

**Hubungan DKP Prov Kaltim dalam mendukung
Tema dan Prioritas Pembangunan Pemprov Kaltim**

SLOGAN PEMBANGUNAN

“MEMBANGUN KALTIM UNTUK NUSANTARA”

Tema Pembangunan Kaltim

2024	2025	2026
Peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan	Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing	Pemantapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN



Prioritas Pembangunan RPD

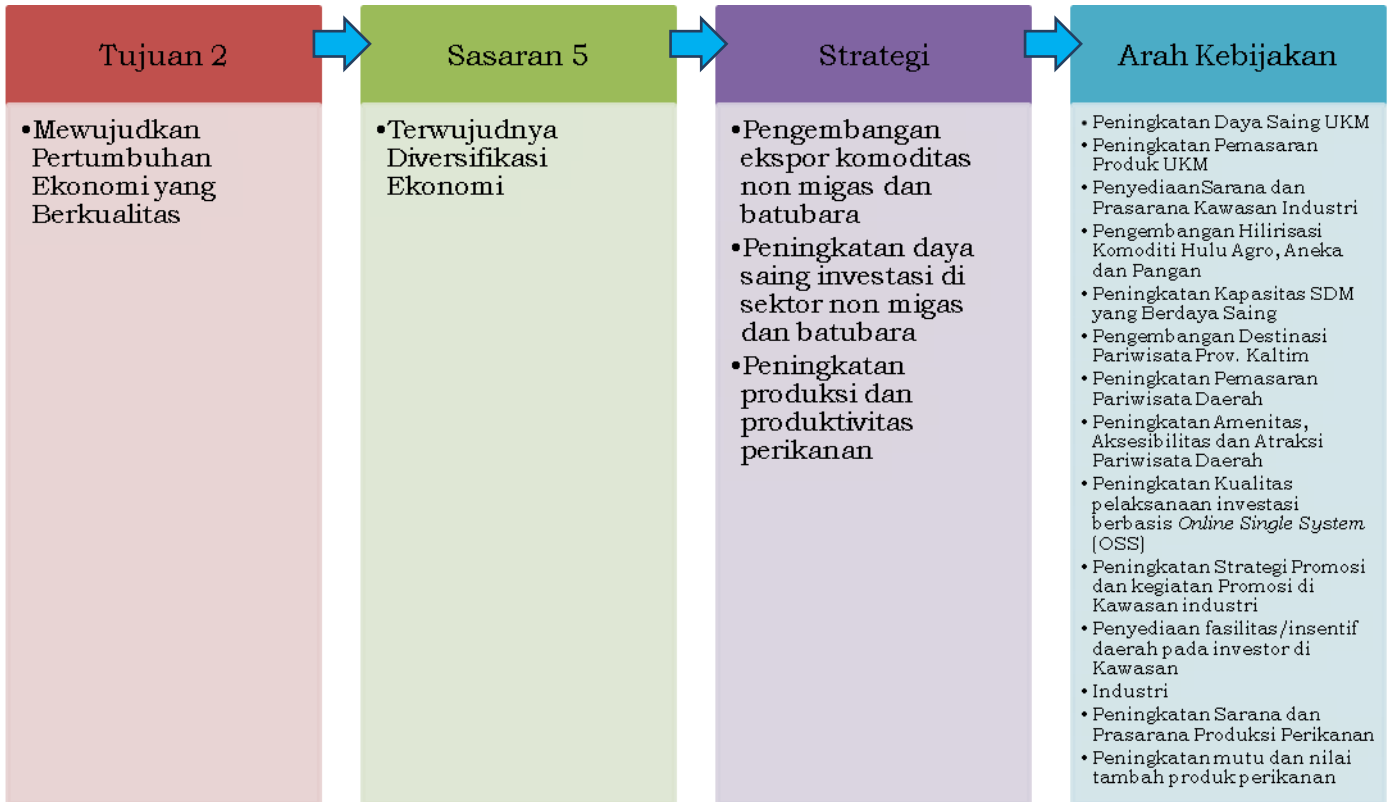
1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya;
3. **Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan;**
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Dari diagram diatas untuk menjamin terwujudnya Tema Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan prioritas pembangunan ketiga untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan serta kondisi potensi wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan. Pemanfaatan secara optimal Sumberdaya Kelautan dan Perikanan merupakan tujuan utama agar meningkatnya kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

Guna mewujudkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggara pelayanan publik, maka perlu dipahami dan dicermati serta diselesaikan dengan baik kondisi faktor-faktor tersebut agar kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel dapat terwujud. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan diarahkan untuk menciptakan kondisi pemungkin dan menyelesaikan permasalahan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan Kaltim selama kurun waktu tiga tahun ke depan berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi dan isu yang berkembang yang harus di respon serta mempertimbangkan peran langsung sektor perikanan dalam kerangka pelaksanaan RPD 2024 -2026 khususnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Gambar 5. Tujuan 2, Sasaran 5, Strategi dan Arah Kebijakan



Secara tidak langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur juga berperan dalam pencapaian Tujuan 4 RPD sebagai berikut:

Gambar 6. Tujuan 4, Sasaran 11, Strategi dan Arah Kebijakan



Dalam mencapai tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan tujuan dan sasaran yang akan diambil. Strategi digunakan untuk mencapai tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya bidang kelautan dan perikanan, dan kebijakan diambil dalam rangka menentukan strategi dan arah kebijakan pada Bab V.

Adapun pernyataan dari tujuan dan sasaran RPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator kinerjanya dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim (sesuai tabel T-C.25 Permendagri 86/2017)

Tujuan/Sasaran RESNTRA	Indikator	Target			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target			
		2024	2025	2026			2024	2025	2026	
Meningkatnya Peran Sub Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	4.50	4.70	4.90						
1. Meningkatkan produksi, kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Produksi Perikanan (Ton)	390,000	396,000	402,000	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	190,000	195,000	200,000	
	2. Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTNP)	100	100	100	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	200,000	201,000	202,000	
						Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	4,181,000	4,393,750	4,612,500	
						Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (Ekor)	1,000,000,000	1,100,000,000	1,200,000,000	
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	59.83	59.9	60	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (produk olahan)	7	11	15
						Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (%)	70	80	90	
2. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	327,819.31	327,819.31	330,814.88	Program pengelolaan kelautan. Pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	72,97	75,45	77.12	
	Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Kelautan dan Perikanan (Pelaku Usaha)	280	290	300	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	100	100	100	
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Poin)	78.50	79.30	80.01						
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	85	85.50	86						

Tujuan/Sasaran RESNTRA	Indikator	Target			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Target						
		2024	2025	2026			2024	2025	2026				
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Poin)	78.50	79.30	80.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90.4	91.4	92.4				
		85	85.50	86		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100				
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPAPAL MANGGAR)	78.50	79.30	80.01	78.50	85	85.50	86	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90.4	91.4	92.4
										Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PMHP)	78.50	79.30	80.01	78.50	85	85.50	86	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90.4	91.4	92.4
										Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPAPAL MANGGAR)	78.50	79.30	80.01	78.50	85	85.50	86	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90.4	91.4	92.4
										Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPAPAL MANGGAR)	78.50	79.30	80.01	78.50	85	85.50	86	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90.4	91.4	92.4
										Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPAPAL MANGGAR)	78.50	79.30	80.01	78.50	85	85.50	86	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90.4	91.4	92.4		
								Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		

Dalam rangka melaksanakan Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur RPD 2024-2026, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (*major project*) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026 tinggi untuk mencapai untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. *Major Project* di DKP yaitu Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting dan Rajungan) yang berlokasi di 6 (enam) Kabupaten/Kota; Berau; Penajam Paser Utara; Paser; Bontang; Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Dalam pelaksanaannya, *major project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan, serta Direktif Kepala Daerah. Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan bersinergi antara DKP Provinsi dengan DKP Kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah.

Adapun *major project* Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan

No	Kabupaten/Kota	Komoditas	Volume (Ton)		
			2024	2025	2026
1	Berau	Udang	900		
		Rumput laut	-		
		Bandeng	943		
		Kepiting	593.90		
		Rajungan	286.10		
		Jumlah	2,723		
2	Penajam Paser Utara	Udang	360		
		Rumput laut	7,676		
		Bandeng	462		
		Kepiting	24.8		
		Rajungan	17.4		
		Jumlah	8,540.2		
		Jumlah Total	11,263.2		
3	Paser	Udang		1,955	
		Rumput laut		2,777	
		Bandeng		7,260	
		Kepiting		101.8	
		Rajungan		108.7	
		Jumlah	12,203		
4	Bontang	Udang		2	
		Rumput laut		4,206	
		Bandeng		5	
		Kepiting		-	
		Rajungan		443.9	
		Jumlah	4,657		
		Jumlah Total	16,859		
5	Kutai Kartanegara	Udang			27,211
		Rumput laut			10,503
		Bandeng			5,877
		Kepiting			411.6
		Rajungan			30.6
		Jumlah	44,033.20		
6	Kutai Timur	Udang			24
		Rumput laut			109
		Bandeng			13
		Kepiting			104.2
		Rajungan			
		Jumlah	250.20		
		Jumlah Total	44,283.40		
Total			11,263.20	16,859	44,283.40

Cascading Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3. Cascading Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK Indikator: 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Poin) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas Indikator: 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Poin) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah Indikator: 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Poin) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariat an (Indeks)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
								Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
								Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
								Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
								Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi Indikator: LPE Non Migas dan Batubara	Meningkatnya Peran Sub Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	Meningkatnya produksi, kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan Indikator:	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
						Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
								Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
			1. Produksi Perikanan (Ton) 2. Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTNP)			Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat
						Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan
								Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia
						Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai,	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
						dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
						Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia
								Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan
									Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana
						Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) (Dinas)	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
						Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
								Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
								Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
								Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat
								Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Unit Teknis Air Payau

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
								Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
								Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (milyar ekor) (UPTD. Manggar)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana UPTD Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab
								Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar
					Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau	Jumlah Prasarana UPTD Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
					Tawar (Ekor) (UPTD. Sebulu)		/Tawar	Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
							Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
			Indikator: 2. Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (produk olahan) (Dinas)	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
						Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko

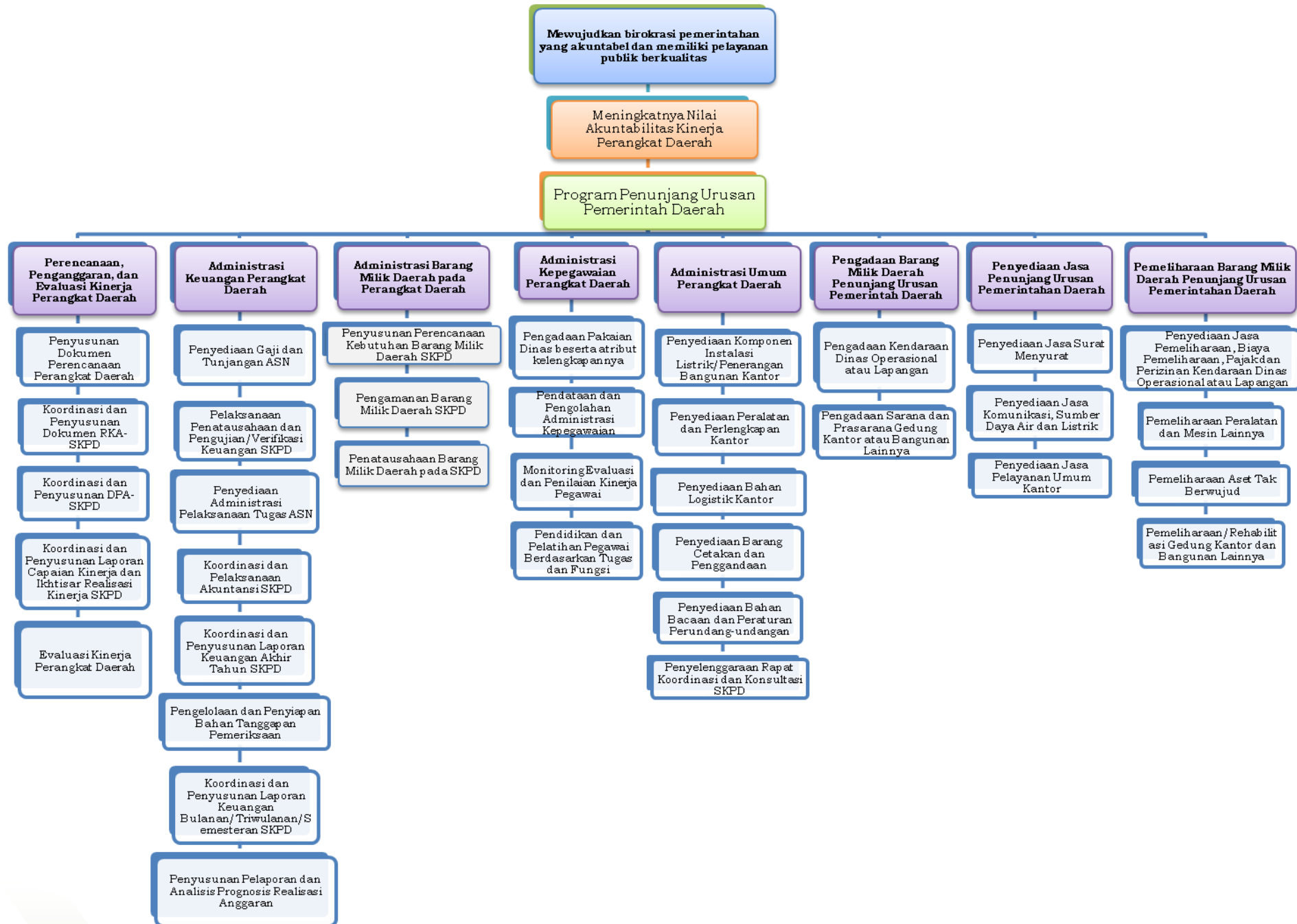
TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
						Besar	Skala Menengah dan Besar		
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas
								Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir
					Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (%) (UPTD. PMHP)	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
			Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan Indikator:	Program pengelolaan kelautan. Pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah Kawasan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K
								Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola

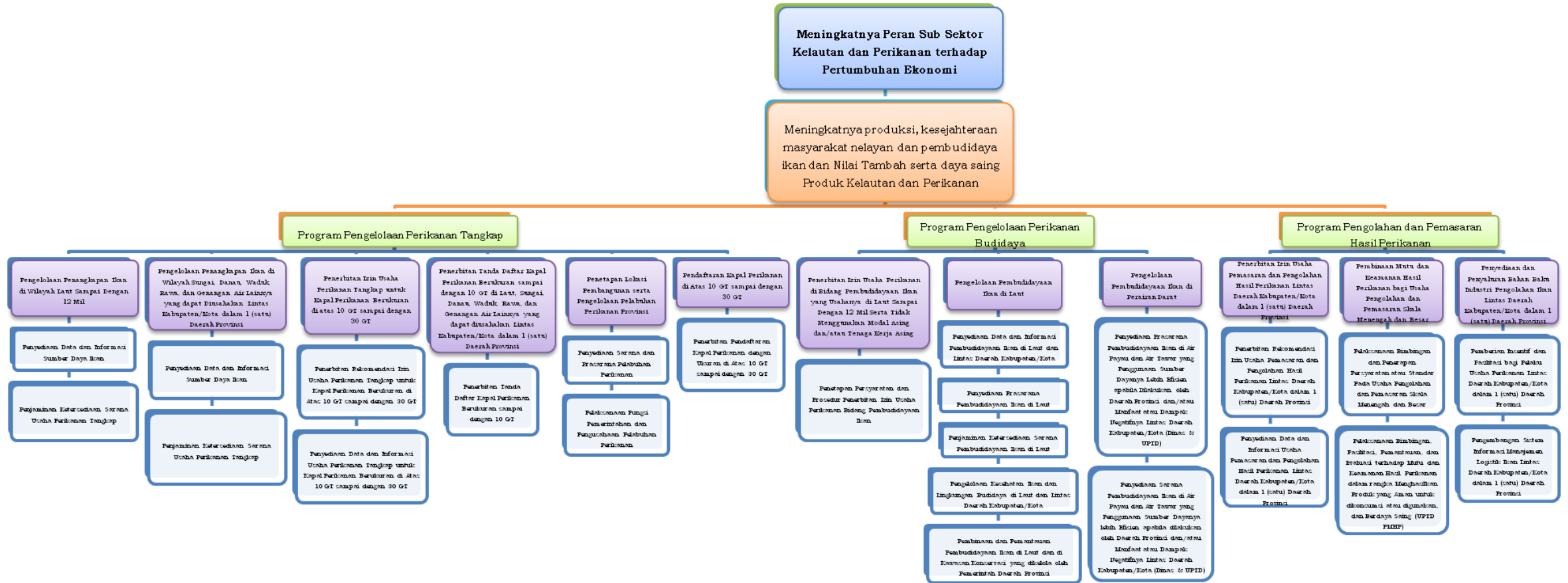
TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
			1. Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)		(%)			Pusat	
								Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi
								Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
						Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi
								Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan
								Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan
								Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan
								Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut

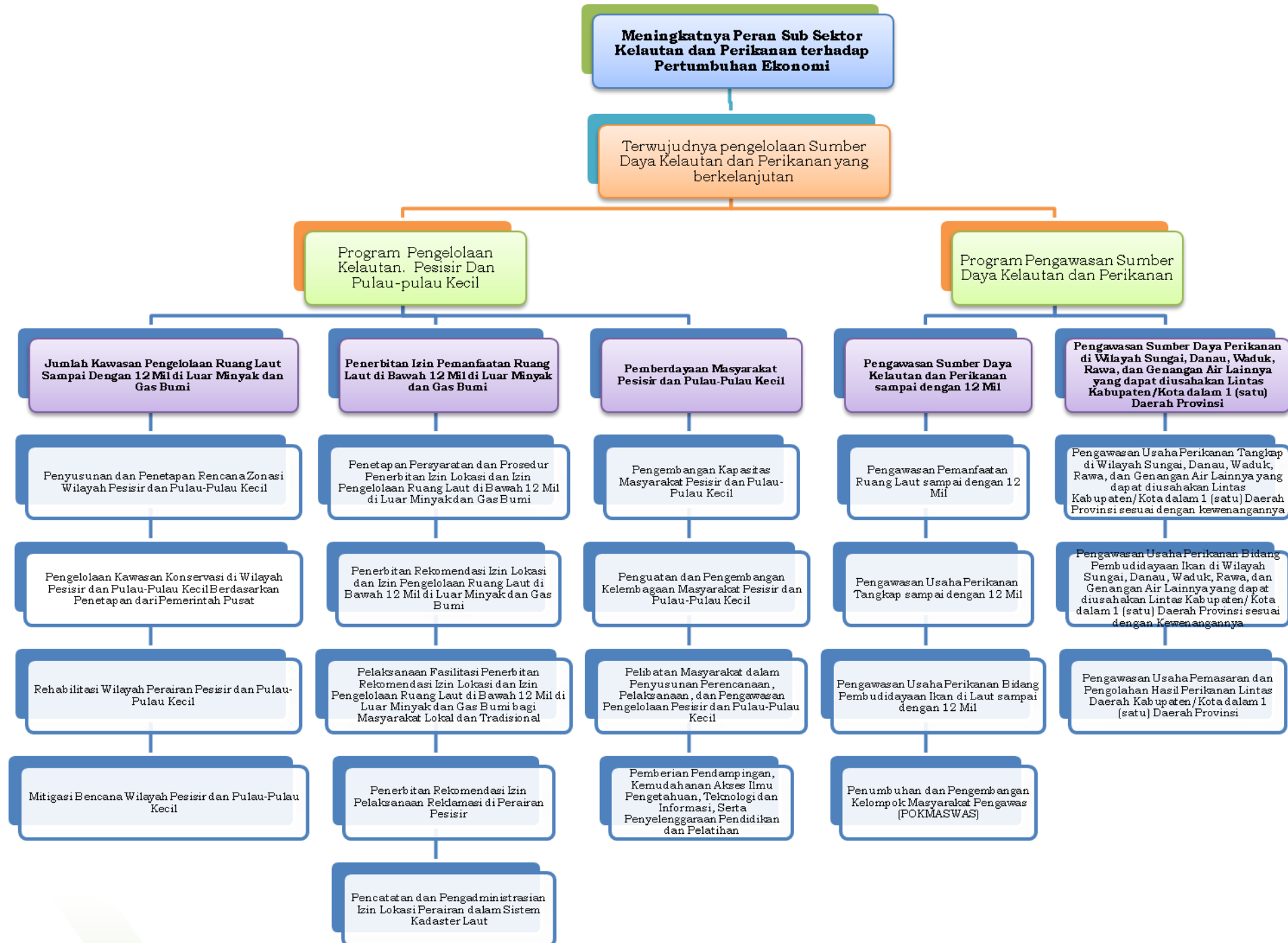
TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
						Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya
								Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
								Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
								Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
			2. Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Kelautan dan Perikanan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dan kelautan (%)	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
								Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
								Pengawasan Usaha Perikanan Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
			(Pelaku Usaha)					Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
								Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif
						Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
								Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
								Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Gambar 7. Pohon Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan







BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur memainkan peran yang sangat penting dalam rangka mendukung transformasi ekonomi sebagai jalan keluar atas permasalahan dan kesadaran untuk melakukan perubahan dalam pembangunan ekonomi yang selama ini bergantung pada eksploitasi SDA yang terbarukan. Adapun komoditas unggulan Kelautan dan Perikanan berupa ikan dan udang memiliki potensi hilirisasi industri pengolahan yang potensial untuk dikembangkan, selain itu perikanan juga memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan serta menurunkan intensitas emisi karbon yang berpengaruh terhadap perbaikan lingkungan (budidaya ramah lingkungan/ *silvofishery*, rehabilitasi mangrove dan terumbu karang).

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur adalah pembangunan yang berkelanjutan yang didasari pada penerapan konsep *Blue Economy* sebagai terjemahan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Transformasi perekonomian ini dalam pelaksanaannya diharapkan mampu menjawab permasalahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yakni: permasalahan penurunan kualitas perekonomian kerakyatan yang berkeadilan dan permasalahan pengelolaan lingkungan khususnya kawasan konservasi perairan dalam upaya menurunkan emisi karbon.

Dalam melaksanakan peran yang dimandatkan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan strategi dan kebijakan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, yaitu 2024-2026. Strategi dan kebijakan dimaksud pada dasarnya adalah upaya sinergis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang bergerak dalam sub sektor kelautan dan perikanan.

Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan guna mencapai tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Selain itu, strategi merupakan alat metode penghubung antara visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan rencana strategis dan

arah kebijakan organisasi sekaligus cara untuk mewujudkan sasaran dengan rancangan secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif.

Strategi untuk mencapai Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan, yaitu yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program perangkat daerah maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas analisis permasalahan dan isu strategis di seputar layanan serta tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM Aparatur Provinsi Kalimantan Timur yang profesional, bermoral dan bertaraf internasional. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan dalam RPD, khususnya yang berhubungan dengan reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan capaian transformasi perekonomian menuju *Blue Economy*.

Adapun Strategi pembangunan yang diambil dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan beserta penjabaran dari arah kebijakan yang akan dikerjakan, dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, yang menjadi harapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah

meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Kelautan dan Perikanan.

Adapun penjabaran hubungan antara tema dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan DKP Prov. Kaltim (sesuai tabel T-C.26 Permendagri 86/2017)

SLOGAN PEMBANGUNAN :	“Membangun Kaltim untuk Nusantara”		
TEMA PEMBANGUNAN KALTIM:	2024	2025	2026
	Peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan	Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing	Pemantapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN
PRIORITAS PEMBANGUNAN III:	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan		

NO	TUJUAN DKP	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Peran Sub Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produksi, kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Peningkatan produksi perikanan tangkap	1. Meningkatkan pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan 2. Mengendalikan kegiatan penangkapan ikan 3. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan perikanan 4. Meningkatkan sarpras fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan
			2. Peningkatan produksi perikanan budidaya	1. Meningkatkan pengembangan perikanan budidaya 2. Meningkatkan pengembangan usaha perikanan budidaya
			3. Peningkatan kualitas Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

NO	TUJUAN DKP	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			4. Peningkatan kualitas hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	1. Meningkatkan kualitas pengujian mutu terhadap produk hasil perikanan 2. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap penerapan mutu hasil perikanan
			5. Peningkatan Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1. Meningkatkan kualitas mutu benih Udang/Ikan Air Laut 2. Meningkatkan penyediaan jumlah benih Udang/Ikan Air Laut 3. Meningkatkan fasilitasi sarpras perbenihan air laut/air payau
			6. Peningkatan Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	1. Meningkatkan kualitas mutu Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar 2. Meningkatkan penyediaan jumlah benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar
		Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan	1. Peningkatan Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	1. Meningkatkan pendayagunaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Meningkatkan reklamasi dan minat investor terhadap jasa kelautan 3. Meningkatkan pelestarian kawasan konservasi kelautan dan perikanan
			2. Peningkatan Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Meningkatkan pengawasan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan penangkapan ikan 2. Meningkatkan pengawasan terhadap pembudidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

NO	TUJUAN DKP	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				3. Melakukan tindak penanganan terhadap pelanggaran kelautan dan perikanan
2	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu 2. Peningkatan Realisasi Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan anggaran 2. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen RKA-SKPD 3. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen DKA-SKPD 4. Meningkatkan kualitas laporan penyusunan capaian kinerja 5. Meningkatkan kualitas laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 1. Meningkatkan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Meningkatkan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Meningkatkan kualitas Pelaksana Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan 4. Meningkatkan kualitas Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5. Meningkatkan kualitas penyusunan kualitas Laporan Keuangan Akhir SKPD 6. Meningkatkan kualitas Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 7. Meningkatkan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester 8. Meningkatkan kualitas Pelaporan

NO	TUJUAN DKP	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			3. Peningkatan kualitas Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Meningkatkan kualitas Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Meningkatkan kualitas Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			4. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas Pakaian beserta atribut kelengkapannya 2. Meningkatkan kualitas Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Meningkatkan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 4. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			5. Peningkatan kualitas Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Meningkatkan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Meningkatkan penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Meningkatkan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Meningkatkan penyediaan Bahan

NO	TUJUAN DKP	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan pemda
			6. Peningkatan kualitas pemenuhan BMD	Meningkatkan penyediaan peralatan dan kelengkapan sarpras
			7. Peningkatkan kualitas pelayanan jasa penunjang tepat waktu	1. Meningkatkan kualitas Surat yang diadministrasikan 2. Meningkatkan penyediaan komunikasi, air dan listrik 3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Kantor (Teknis dan Non Teknis)
			8. Peningkatan kualitas BMD yang digunakan dan berfungsi baik	1. Meningkatkan penyediaan peralatan dan kelengkapan sarpras 2. Meningkatkan penyediaan pemeliharaan peralatan kantor 3. Meningkatkan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 4. Meningkatkan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarpras

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tiga tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “hasil akhir” Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengembangkan dan mengelola komoditas perikanan yang berdaya saing.

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya (Tabel 5.1), langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan berikut indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun.

Adapun rencana program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur beserta indikator target kinerja utama dan rencana beberapa kegiatan beserta indikator target kinerja individu, diuraikan sesuai perkiraan pendanaan sampai dengan tahun 2026. Penetapan rencana disertai juga dengan lokus pelaksanaan kegiatan dimaksud berdasarkan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.

Rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 s/d tahun 2026 dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan DKP Prov. Kaltim

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
PAGU MURNI								84,766,886,639		79,916,887,000		80,616,887,188		80,616,887,188	
PAGU FCPF								2,763,536,361		2,763,536,361		6,217,956,812		6,217,956,812	
TOTAL PAGU								87,530,423,000		82,680,423,361		86,834,844,000		86,834,844,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	89.4	84	90.4	37,820,820,000	91.4	37,497,028,000	92.4	37,812,028,000	92.4	37,812,028,000	
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	4,873,393,600	100	5,097,185,600	100	5,032,397,600	100	5,032,397,600	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	1,880,000,000	100	1,880,000,000	100	1,950,000,000	100	1,950,000,000	Berau,Kukar, Btg,PPU,BPN, SMD
	3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	8	500,000,000	8	500,000,000	8	500,000,000	8	500,000,000	Berau,Kukar, Btg,PPU,BPN, SMD
	3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	2	225,000,000	2	225,000,000	2	225,000,000	2	225,000,000	Samarinda, Balikpapan, Kukar

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	2	225,000,000	2	225,000,000	2	225,000,000	2	225,000,000	Samarinda, Balikpapan, Kukar
	3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3	655,000,000	3	655,000,000	3	700,000,000	3	700,000,000	Berau, Kukar, Btg, PPU, BPN, SMD
	3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	275,000,000	1	275,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Berau, Kukar, Btg, PPU, BPN, SMD
Meningkatnya realisasi anggaran	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	100	25,150,000,000	100	25,150,000,000	100	25,250,000,000	100	25,250,000,000	Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Kukar, Kab. Kutim, Kab. PPU, dan Kab. Berau.

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	123	123	123	23,350,000,000	123	23,350,000,000	123	23,450,000,000	123	23,450,000,000	Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Kukar, Kab. Kutim, Kab. PPU, dan Kab. Berau.
	3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	1	700,000,000	1	700,000,000	1	700,000,000	1	700,000,000	Samarinda
	3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Samarinda
	3.25.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Kukar, Kab. Kutim, Kab. PPU, dan Kab. Berau.
	3.25.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Kukar, Kab. Kutim, Kab. PPU, dan Kab. Berau.

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Keuangan Akhir Tahun SKPD												
	3.25.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
	3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Kukar, Kab. Kutim, Kab. PPU, dan Kab. Berau.
	3.25.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	%	20	20	20	315,000,000	20	315,000,000	20	315,000,000	20	315,000,000	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.01.1.01.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	
	3.25.01.1.01.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	
	3.25.01.1.01.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	1	135,000,000	1	135,000,000	1	135,000,000	1	135,000,000	
Meningkatnya kualitas SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20	20	20	964,820,000	20	735,000,000	20	1,185,000,000	20	1,185,000,000	
	3.25.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	-	1	394,820,000	-	-	1	415,000,000	1	415,000,000	
	3.25.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	1	135,000,000	1	135,000,000	1	135,000,000	1	135,000,000	
	3.25.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi.	Dokumen	-	-	1	135,000,000	1	135,000,000	1	135,000,000	1	135,000,000	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Pegawai	dan Penilaian Kinerja Pegawai												
	3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	45	50	300,000,000	55	465,000,000	60	500,000,000	60	500,000,000	
Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	2,344,643,600	100	2,463,435,600	100	2,343,647,600	100	2,343,647,600	
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	32,500,000	1	37,500,000	1	42,500,000	1	42,500,000	
	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	150,000,000	1	160,000,000	1	170,000,000	1	170,000,000	
	3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	195,908,000	1	200,908,000	1	205,908,000	1	205,908,000	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	50,000,000	1	51,886,000	1	56,886,000	1	56,886,000	
	3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	25,000,000	1	28,240,000	1	33,240,000	1	33,240,000	
	3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1,891,235,600	1	1,984,901,600	1	1,835,113,600	1	1,835,113,600	
Meningkatnya kualitas pemenuhan BMD	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	100	100	100	1,300,000,000	100	1,201,028,000	100	891,028,000	100	891,028,000	
	3.25.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	3	1	400,000,000	1	400,000,000	-	-	-	-	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	3	900,000,000	3	801,028,000	3	891,028,000	3	891,028,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang tepat waktu	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100	100	100	9,428,750,000	100	9,533,750,000	100	9,588,750,000	100	9,588,750,000	
	3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	28,750,000	1	33,750,000	1	38,750,000	1	38,750,000	
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	2,500,000,000	1	2,600,000,000	1	2,650,000,000	1	2,650,000,000	
	3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	6,900,000,000	1	6,900,000,000	1	6,900,000,000	1	6,900,000,000	
Meningkatnya kualitas BMD yang digunakan dan berfungsi baik	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100	100	100	1,311,000,000	100	1,316,000,000	100	1,321,000,000	100	1,321,000,000	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Daerah													
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	20	550,000,000	20	550,000,000	20	550,000,000	20	550,000,000	
	3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	20	161,000,000	20	166,000,000	20	171,000,000	20	171,000,000	
	3.25.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	
	3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	3	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	70	297,805.9 (Ha)	72.97	6,726,502,000	75.45	6,093,202,000	77.12	7,262,183,000	77.12	7,262,183,000	
Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kawasan	1	1	1	3,142,302,000	1	2,509,602,000	1	3,343,532,000	1	3,343,532,000	
	3.25.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	1	1	268,000,000	1	268,000,000	1	270,000,000	1	270,000,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser
	3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	2 (Kawasan)	3,982.30	293,030.78	2,395,302,000	327,819.31	1,762,602,000	327,819.31	2,586,532,000	327,819.31	2,586,532,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	5	5	5	372,000,000	6	372,000,000	7	377,000,000	7	377,000,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser
	3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	30	30	30	107,000,000	30	107,000,000	30	110,000,000	30	110,000,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser
Meningkatnya Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rekomendasi	1	4	6	2,090,000,000	8	2,090,000,000	8	2,120,200,000	8	2,120,200,000	
	3.25.02.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	2	2	2	420,000,000	3	420,000,000	3	425,000,000	3	425,000,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	2	2	450,000,000	3	450,000,000	3	460,000,000	3	460,000,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser
	3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	1	1	676,000,000	1	676,000,000	1	685,200,000	1	685,200,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser
	3.25.02.1.02.04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser
	3.25.02.1.02.05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Dokumen	1	1	1	444,000,000	1	444,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok Masyarakat	2	13	14	1,494,200,000	15	1,493,600,000	17	1,798,451,000	17	1,798,451,000	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	2	60	60	416,000,000	90	407,678,000	90	553,036,000	90	553,036,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser
	3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	4	1	1	175,000,000	1	175,000,000	1	177,000,000	1	177,000,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser
	3.25.02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	6	50	90	442,000,000	90	449,722,000	120	602,915,000	120	602,915,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser
	3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	4	5	5	461,200,000	6	461,200,000	6	465,500,000	6	465,500,000	Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya produksi dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	177,514	182,730	190,000	9,700,000,000	195,000	8,250,000,000	200,000	8,500,000,000	200,000	8,500,000,000	10 Kab/Kota
Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kegiatan	2	2	1	2,970,000,000	1	1,775,000,000	1	1,780,000,000	1	1,780,000,000	8 Kab/Kota
	3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	Berau, Kutim, Bontang, Samarinda, Kukar, Balikpapan, PPU dan Paser
	3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	87	66	28	2,820,000,000	28	1,625,000,000	28	1,630,000,000	28	1,630,000,000	Berau, Kutim, Bontang, Samarinda, Kukar, Balikpapan, PPU dan Paser
Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	4	4	1	620,000,000	1	620,000,000	1	650,000,000	1	650,000,000	8 Kab/Kota

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.03.1.02.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen	1	1	1	120,000,000	1	120,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	Mahulu, Kubar, Kukar, Samarinda, Berau, Kutim, PPU dan Paser
	3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	6	4	10	500,000,000	10	500,000,000	10	525,000,000	10	525,000,000	Kubar, Samarinda dan Kukar
Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi	195	175	180	1,300,000,000	185	870,000,000	190	875,000,000	190	875,000,000	8 Kab/Kota
	3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	195	175	180	650,000,000	185	435,000,000	190	440,000,000	190	440,000,000	Berau, Kutim, Bontang, Samarinda, Kukar Balikpapan, PPU, Paser
	3.25.03.1.03.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Dokumen	195	175	180	650,000,000	185	435,000,000	190	435,000,000	190	435,000,000	Berau, Kutim, Bontang, Samarinda, Kukar Balikpapan, PPU, Paser

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	417	800	810	1,760,000,000	820	1,885,000,000	830	2,000,000,000	830	2,000,000,000	10 Kab/Kota
	3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen	417	800	810	1,760,000,000	820	1,885,000,000	830	2,000,000,000	830	2,000,000,000	Berau, Kutim, Bontang, Samarinda, Kukar, Kubar, Mahulu, Balikpapan, PPU dan Paser
Meningkatnya kualitas Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelabuhan Perikanan	3	4	6	3,000,000,000	6	3,025,000,000	6	3,060,000,000	6	3,060,000,000	Berau, Kutim, Bontang, Samarinda dan PPU
	3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	2 (Unit)	300 (Unit)	6	2,200,000,000	6	2,225,000,000	6	2,235,000,000	6	2,235,000,000	Berau, Kutim, Bontang, Samarinda dan PPU

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	6	6	6	800,000,000	6	800,000,000	6	825,000,000	6	825,000,000	Berau, Kutim, Bontang, Samarinda dan PPU
Meningkatnya Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi	-	-	10	50,000,000	15	75,000,000	20	135,000,000	20	135,000,000	
	3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	-	-	10	50,000,000	15	75,000,000	20	135,000,000	20	135,000,000	
Meningkatnya produksi dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	162,114	178,961	200,000	8,209,895,361	201,000	8,103,195,361	202,000	10,500,774,000	202,000	10,500,774,000	
Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	1	2	3	200,000,000	4	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.04.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	3	3	200,000,000	4	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	10 Kabupaten/Kota
Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Lokasi	3	10	10	3,999,895,361	10	3,852,146,000	10	5,550,900,000	10	5,550,900,000	10 Kab/Kota
	3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	351,359,000	1	351,359,000	1	360,000,000	1	360,000,000	Balikpapan
	3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	2	2	2	600,000,000	2	600,000,000	2	615,000,000	2	615,000,000	Berau dan Bontang
	3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	3	3	3	1,818,536,361	3	1,670,787,000	3	3,320,900,000	3	3,320,900,000	Berau, Bontang, Balikpapan
	3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	60	70	80	780,000,000	90	780,000,000	100	780,000,000	100	780,000,000	10 Kab/Kota
	3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah	Jumlah Pembudidaya	Orang	75	75	70	450,000,000	80	450,000,000	90	475,000,000	90	475,000,000	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Lokasi		
					2022	2023	2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	3.25.04.1.06	Daerah Provinsi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	Dokumen	-	-	1	4,010,000,000	1	4,051,049,361	1	4,749,874,000	1	4,749,874,000	
	3.25.04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Unit Teknis Air Payau	Unit	1	1	1	1,100,000,000	1	1,100,000,000	1	1,100,000,000	1	1,100,000,000	Kukar
	3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	-	-	1	2,910,000,000	1	2,951,049,361	1	3,649,874,000	1	3,649,874,000	Paser, PPU, Kukar, Kubar, Kutim, Samarinda, Berau

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	41.39	47.06	100	3,299,287,000	100	3,299,287,000	100	3,340,000,000	100	3,340,000,000	
Meningkatnya Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	%	100	100	100	2,098,104,180	100	2,098,104,180	100	2,126,669,500		2,126,669,500	10 Kabupaten/Kota
	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	4	3	3	835,516,680	4	835,516,680	5	848,260,000	5	848,260,000	10 Kabupaten/Kota
	3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	30	7	153	652,282,500	153	652,282,500	153	662,256,000	153	662,256,000	7 Kabupaten/Kota
	3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	15	2	13	371,055,000	13	371,055,000	13	373,246,000	13	373,246,000	2 Kabupaten/Kota
	3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar	Kelompok	18	20	18	239,250,000	18	239,250,000	19	242,907,500	19	242,907,500	10 Kabupaten/Kota

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dan Aktif Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	100	100	100	1,201,182,820	100	1,201,182,820	100	1,213,330,500	100	1,213,330,500	6 Kabupaten/Kota
	3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	6	3	6	312,765,000	6	312,765,000	6	317,623,000	6	317,623,000	3 Kabupaten/Kota

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	15	3	27	387,367,500	27	387,367,500	28	393,269,250	28	393,269,250	3 Kabupaten/Kota
	3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	18	6	65	501,050,320	65	501,050,320	65	502,438,250	65	502,438,250	6 Kabupaten/Kota
Meningkatnya produksi dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk Olahan	3	4	7	1,723,064,000	11	1,463,064,000	15	1,510,000,000	15	1,510,000,000	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	4	2	4	650,000,000	4	650,000,000	4	685,000,000	4	685,000,000	
	3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	30	10	11	70,000,000	12	75,000,000	13	80,000,000	13	80,000,000	
	3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	5	4	3	580,000,000	4	575,000,000	5	605,000,000	5	605,000,000	10 Kabupaten/Kota

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya Pengelolaan UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	UMKM	31	20	10	773,064,000	10	513,064,000	10	525,000,000	10	525,000,000	
	3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	30	20	15	773,064,000	20	513,064,000	25	525,000,000	25	525,000,000	10 Kabupaten/Kota
Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lokasi	1	1	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha	1	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	10 Kabupaten/Kota
	3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Dokumen	1	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	10 Kabupaten/Kota
	01.00	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	-				6,943,610,400		5,143,610,400		5,143,610,400		5,143,610,400		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	89.4	84	90.4	1,020,338,800	91.4	1,020,338,800	92.4	1,020,338,800	92.4	1,020,338,800	
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	928,985,750	100	928,985,750	100	928,985,750	100	928,985,750	
Meningkatnya realisasi anggaran	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	100	98,760,000	100	98,760,000	100	98,760,000	100	98,760,000	
	3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	98,760,000	1	98,760,000	1	98,760,000	1	98,760,000	Balikpapan

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya kualitas SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20	20	20	91,873,000	20	91,873,000	20	91,873,000	20	91,873,000	
	3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	4	4	91,873,000	4	91,873,000	4	91,873,000	4	91,873,000	Balikpapan
Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	654,426,200	100	654,426,200	100	654,426,200	100	654,426,200	
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	8,146,950	1	8,146,950	1	8,146,950	1	8,146,950	Balikpapan
	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Balikpapan
	3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	27,156,150	1	27,156,150	1	27,156,150	1	27,156,150	Balikpapan
	3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	10,741,500	1	10,741,500	1	10,741,500	1	10,741,500	Balikpapan

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	4,032,000	1	4,032,000	1	4,032,000	1	4,032,000	Balikpapan
	3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	554,349,600	1	554,349,600	1	554,349,600	1	554,349,600	10 Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang tepat waktu	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100	100	100	687,194,750	100	687,194,750	100	687,194,750	100	687,194,750	
	3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	2,237,550	1	2,237,550	1	2,237,550	1	2,237,550	Balikpapan
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	272,322,000	1	272,322,000	1	272,322,000	1	272,322,000	Balikpapan
	3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	412,635,200	1	412,635,200	1	412,635,200	1	412,635,200	Balikpapan
Meningkatnya kualitas BMD yang digunakan dan berfungsi baik	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100	100	100	417,070,600	100	417,070,600	100	417,070,600	100	417,070,600	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	1	101,323,950	1	101,323,950	1	101,323,950	1	101,323,950	Balikpapan
	3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	215,746,650	1	215,746,650	1	215,746,650	1	215,746,650	Balikpapan
	3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Balikpapan
Meningkatnya produksi dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Milyar Ekor	2.9	3	1	4,994,285,850	1	3,194,285,850	1,2	3,194,285,850	1,2	3,194,285,850	
Meningkatnya Kualitas Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Milyar Ekor	2.9	3	1	4,994,285,850	1	3,194,285,850	1,2	3,194,285,850	1,2	3,194,285,850	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana UPTD Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	Unit	2	2	2	2,220,000,000	2	420,000,000	2	420,000,000	2	420,000,000	Balikpapan
	3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD Manggar Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Unit	2	2	2	2,774,285,850	2	2,774,285,850	2	2,774,285,850	2	2,774,285,850	Balikpapan
	01.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan					2,032,706,639		1,532,707,000		1,532,707,000		1,532,707,000		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	89.4	84	90.4	993,966,249	91.4	730,341,277	92.4	733,163,120	92.4	733,163,120	
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	537,790,559	100	559,069,649	100	559,192,640	100	559,192,640	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya realisasi anggaran	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	100	69,480,000	100	69,480,000	100	69,480,000	100	69,480,000	
	3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	69,480,000	1	69,480,000	1	69,480,000	1	69,480,000	Samarinda
Meningkatnya kualitas SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20	20	20	405,293,639	20	137,563,407	20	139,251,000	20	139,251,000	
	3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	14	15	405,293,639	15	137,563,407	15	139,251,000	15	139,251,000	Samarinda, Balikpapan, Luar Daerah
Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	412,535,175	100	433,610,765	100	427,465,465	100	427,465,465	
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	4,505,125	1	5,180,000	1	5,950,000	1	5,950,000	Samarinda
	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	31,200,750	1	32,760,000	1	34,800,000	1	34,800,000	Samarinda

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	5,035,800	1	5,287,590	1	5,500,000	1	5,500,000	Samarinda
	3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	18,129,500	1	19,035,975	1	19,035,975	1	19,035,975	Samarinda
	3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	2,016,000	1	2,116,800	1	2,434,320	1	2,434,320	Samarinda
	3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	351,648,000	1	369,230,400	1	359,745,170	1	359,745,170	Samarinda
Meningkatnya kualitas pemenuhan BMD	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	100	100	100	21,615,000	100	22,695,750	100	23,830,000	100	23,830,000	
	3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	10	21,615,000	10	22,695,750	10	23,830,000	10	23,830,000	Samarinda
Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang tepat waktu	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100	100	100	497,338,504	100	497,542,004	100	503,810,295	100	503,810,295	
	3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	4,070,000	1	4,273,500	1	4,487,175	1	4,487,175	Samarinda

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	121,185,384	1	121,185,384	1	127,240,000	1	127,240,000	Samarinda
	3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	372,083,120	1	372,083,120	1	372,083,120	1	372,083,120	Samarinda
Meningkatnya kualitas BMD yang digunakan dan berfungsi baik	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100	100	100	125,494,490	100	128,519,000	100	128,519,000	100	128,519,000	
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	2	60,494,490	2	63,519,000	2	63,519,000	2	63,519,000	Samarinda
	3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	25	65,000,000	25	65,000,000	25	65,000,000	25	65,000,000	Samarinda
Meningkatnya produksi dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	%	310 (Sampel)	240 (Sampel)	70	500,949,831	80	243,296,074	90	240,351,240	90	240,351,240	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya kualitas hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	%	310 (Sampel)	240 (Sampel)	70	500,949,831	80	243,296,074	90	240,351,240	90	240,351,240	
	3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	310 (Sampel)	10	10	500,949,831	8	243,296,074	8	240,351,240	8	240,351,240	10 Kabupaten/Kota
	01.00	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu						6,201,144,000		6,201,144,000		6,201,144,000		6,201,144,000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	89.4	84	90.4	3,455,275,360	91.4	3,335,164,860	92.4	3,515,758,600	92.4	3,515,758,600	
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	1,070,150,000	100	1,133,600,000	100	1,061,175,000	100	1,061,175,000	

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya realisasi anggaran	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	100	99,280,000	100	99,280,000	100	99,280,000	100	99,280,000	
	3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	99,280,000	1	99,280,000	1	99,280,000	1	99,280,000	Muara Badak dan Sebulu
Meningkatnya kualitas SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20	20	20	231,201,000	20	231,201,000	20	231,201,000	20	231,201,000	
	3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	18	18	231,201,000	18	231,201,000	18	231,201,000	18	231,201,000	Muara Badak dan Sebulu
Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	886,750,000	100	950,200,000	100	877,775,000	100	877,775,000	
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	45,500,000	1	47,750,000	1	50,165,000	1	50,165,000	Muara Badak dan Sebulu
	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	196,750,000	1	125,450,000	1	125,450,000	1	125,450,000	Muara Badak dan Sebulu

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	55,500,000	1	55,500,000	1	55,500,000	1	55,500,000	Muara Badak dan Sebulu
	3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	Muara Badak dan Sebulu
	3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	564,000,000	1	696,500,000	1	621,660,000	1	621,660,000	10 Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas pemenuhan BMD	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	-	-	100	599,000,000	100	242,500,000	100	50,000,000	100	50,000,000	
	3.25.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	2	500,000,000	3	112,500,000	-	-	-	-	Muara Badak dan Sebulu
	3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	8	99,000,000	2	130,000,000	8	50,000,000	8	50,000,000	Muara Badak dan Sebulu
Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang tepat waktu	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100	100	100	1,634,737,600	100	1,634,737,600	100	1,634,737,600	100	1,634,737,600	
	3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	Muara Badak dan Sebulu

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	182,400,000	1	182,400,000	1	182,400,000	1	182,400,000	Muara Badak dan Sebulu
	3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1,451,337,600	1	1,451,337,600	1	1,451,337,600	1	1,451,337,600	Muara Badak dan Sebulu
Meningkatnya kualitas BMD yang digunakan dan berfungsi baik	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100	100	100	1,074,456,760	100	1,310,846,260	100	1,683,940,000	100	1,683,940,000	
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	5	144,160,000	5	134,160,000	5	134,160,000	5	134,160,000	Muara Badak dan Sebulu
	3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	40	49,780,000	40	49,780,000	40	49,780,000	40	49,780,000	Muara Badak dan Sebulu
	3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	2	2	3	880,516,760	6	1,126,906,260	7	1,500,000,000	7	1,500,000,000	Muara Badak dan Sebulu

Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
					2022	2023	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
					Capaian	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya produksi dan Nilai Tambah serta daya saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	Ekor	2,075,000	3,797,000	4,181,000	1,675,718,640	4,393,750	1,732,379,140	4,612,500	1,624,210,400	4,612,500	1,624,210,400	
Meningkatnya kualitas Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar (Ekor)	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar (Ekor)	Ekor	2,075,000	3,797,000	4,181,000	1,675,718,640	4,393,750	1,732,379,140	4,612,500	1,624,210,400	4,612,500	1,624,210,400	
	3.25.04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana UPTD Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang direhab	Unit	2	1	2	638,839,500	1	695,500,000	3	587,322,000	3	587,322,000	Muara Badak dan Sebulu
	3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana UPTD Sebulu Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Unit	2	1	1	1,036,879,140	1	1,036,879,140	1	1,036,888,400	1	1,036,888,400	Muara Badak dan Sebulu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran program dan kegiatan berjalan dengan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan indikator kinerja dengan tujuan, yaitu untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam tiga tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPD yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai perencana sekaligus penyelenggaraan pembangunan daerah. Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 (Tabel T-C.28)

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Target			Kondisi Kinerja Akhir
				2024	2025	2026	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	89.4	90.4	91.4	92.4	92.4
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPAPAL MANGGAR)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	89.4	90.4	91.4	92.4	92.4
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PMHP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	89.4	90.4	91.4	92.4	92.4
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPAPALSEBULU)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	89.4	90.4	91.4	92.4	92.4
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Target			Kondisi Kinerja Akhir
				2024	2025	2026	
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	177,514	190,000	195,000	200,000	200,000
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	162,114	200,000	201,000	202,000	202,000
		Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (ekor)	3,000,000,000	1,000,000,000	1,100,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
		Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	3,797,000	4,181,000	4,393,750	4,612,500	4,612,500
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan (produk olahan)	4	7	11	15	15
		Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (%)	60	70	80	90	90
8	Program pengelolaan kelautan. Pesisir dan pulau-pulau kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	70	72,97	75,45	77.12	77.12
9	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	59.09	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung indikator sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi indikator tujuan atau sasaran yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.

Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan ditargetkan mencapai nilai Akuntabilitas Kinerja dengan predikat 70 sampai akhir periode, yang diharapkan akan berkontribusi pada indikator sasaran RPD yaitu nilai akuntabilitas provinsi Kalimantan timur.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan berbagai kebijakan pengembangan sub sektor kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya yang sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur bersifat dinamis dan harus mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya peningkatan perekonomian Kalimantan Timur yang berkelanjutan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 disusun melalui tahapan sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sedangkan Permendagri Nountuk klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-5889 tentang hasil verifikasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dab Keuangan Daerah.

8.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan sub program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan. Sasaran utama dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selaku lembaga yang diberikan kewenangan bidang kelautan dan perikanan adalah memastikan bahwa pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat meningkatkan ekonominya serta menjaga sumberdaya agar lestari dan berkelanjutan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan

sesuai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 bersifat fleksibel dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mengedepankan aspek perencanaan Perangkat Daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Setelah RPD Tahun 2024-2026 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 menjadi rancangan akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPD Kaltim tahun 2024-2026.

Setelah rancangan akhir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) yang merujuk pada tabel 4.1 pada Bab IV Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) yang merujuk pada tabel 6.1 pada Bab VI Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) yang merujuk pada tabel 6.1 pada Bab VI Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun Laporan Kinerja sekaligus dijadikan instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektifitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun


kedepan sehingga Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program tahun 2024-2026 dituangkan kedalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RPD Provinsi Kalimantan Timur.

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Kesuma Bangsa No. 1 Telp. (0541) 743506 - 741977 - 741699, Fax. 743677
Website: <https://dkp.kaltimprov.go.id> - Email: dkpprovkaltim@gmail.com
S A M A R I N D A (75123)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 500.5/ /DKP-I

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan dengan memberikan landasan Penentuan Program dan Kegiatan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
- b. bahwa guna meningkatkan sistem perencanaan perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu menyusun RENSTRA Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
6. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) No. 52 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026;

11. Peraturan Daerah Nomor 48 Tanggal 1 Desember 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) SKPD Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 70 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 38 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dengan susunan Tim sebagai berikut :

Penanggung Jawab : H. Irhan Hukmaiday, S.Pi, MP
Ketua : Drs. Saharuddin, M.Si
Sekretaris : Tri Hastuti, SE, M.Si
Anggota : Eko Kurniawan, A.Pi, MP
: M. Ali Aripe, A.Pi, M.Si
: Petrijansyah Noor, S.Pi, MP
: Irma Listiyawati, S.Pi, MP
: Herwansyah, S.Sos, M.Si
: Lily Mulyati, SE
: Marlian, S.Pi, MP
: Deni Ropikanur, S.Pi, M.Si
: Heliana, S.Sos
: Edy Harfandi, S.Sos

KEDUA

Lingkup Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 termasuk capaian kemajuannya;
2. Mempelajari sasaran serta tujuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
4. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan yang diperlukan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
6. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

- KETIGA Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 bertanggung jawab mulai proses penyusunan sampai proses akhir penyelesaian dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT Uraian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
pada tanggal :

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur,



H. Irhan Hukmaidy, S.Pi, MP
Pembina Tk. I
NIP. 197512282000031002

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Ada	Tidak Ada		
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
7	Perumusan isu-isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi				
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 3 (tiga) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	√			
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	√			

Samarinda, Juli 2023
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur,



H. Irhan Hukmaidly, S.Pi, MP
NIP. 197512282000031002



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Kesuma Bangsa No. 1 Telp. (0541) 743506 – 741699 Samarinda
Website: <https://dkp.kaltimprov.go.id>